

**ANALISIS PERKEMBANGAN PENERIMAAN DAN
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SELAMA
OTONOMI KHUSUS**

Studi Kasus pada Pemerintah Kota Jayapura

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

DYAH HAYU SUSETYA DEWI

002114168

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2006

SKRIPSI

**ANALISIS PERKEMBANGAN PENERIMAAN DAN
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SELAMA
OTONOMI KHUSUS**

Studi Kasus pada Pemerintah Kota Jayapura

Oleh:

DYAH HAYU SUSETYA DEWI

002114168

Telah disetujui oleh:

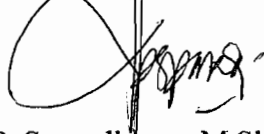
Dosen Pembimbing I



Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.

tanggal 7 November 2005

Dosen Pembimbing II



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.

tanggal 9 Desember 2005

SKRIPSI

**ANALISIS PERKEMBANGAN PENERIMAAN DAN
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SELAMA
OTONOMI KHUSUS**

Studi Kasus pada Pemerintah Kota Jayapura

Dipersiapkan dan ditulis oleh

DYAH HAYU SUSETYA DEWI

002114168

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 15 Februari 2006

dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM., Akt.
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.
Anggota	D. Desembriarto, S.E., M.Si.

Agustinawansari
.....
Lisia Apriani
.....
Firma Sulistiyowati
.....
Supardiyono
.....
Desembriarto
.....

Yogyakarta, 28 Februari 2006

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



Alex Kahu Lantum
.....
Drs. Alex Kahu Lantum. M.S.

Motto

Tidak Pernah Putus Asa
Ketika anda mengatakan suatu keadaan atau
seseorang itu tidak ada harapan,
Anda membanting pintu didepan wajah Allah.
-Reverend Charles Allen-

Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan,
bertekunlah dalam doa.
-Roma 12 : 12-

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
-Amsal 3 : 5-

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau,
janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu,
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau
dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.
-Yesaya 41 : 10-

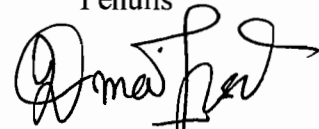
Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Sahabatku Yesus Kristus
Bundaku Maria Ratu Rosari
Papa Ignatius Agung Bratanto
Mama Margareth Augusta Roeroe
Kakak Taufan Setiawan Abadi & Widya Setyowati
Adik Hero Tri Anggoro
Keponakan Dhyte & Dinda
Saudariku Riana
keluargaku dalam Tuhan Yesus Kristus ;
K'Dani, Artha, K'Ronald, Lhina, Yanto, Esen,
Ester, Harley, Thomas, Hendra.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Penulis



Dyah Hayu Susetya Dewi

Abstrak

ANALISIS PERKEMBANGAN PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI KHUSUS

Studi Kasus pada Pemerintah Kota Jayapura

Dyah Hayu Susetya Dewi
002114168
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan penerimaan dan kontribusi Pajak Daerah sebelum otonomi khusus dan selama otonomi khusus tahun 1999/2000 sampai dengan tahun 2004 di kota Jayapura.

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui perkembangan penerimaan dan kontribusi Pajak Daerah adalah dengan melakukan perhitungan trend sebelum dan selama otonomi khusus. Khusus untuk rumusan masalah yang kedua, dicari dulu besarnya kontribusi Pajak Daerah. Kemudian untuk mengetahui apakah terdapat perkembangan yang signifikan maka digunakan metode pengujian hipotesa, yaitu dengan membandingkan hasil antara nilai t-tabel dengan nilai t-hitung. Dimana, apabila $-t \text{ tabel} > t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima atau tidak ada perkembangan yang signifikan dan apabila $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak atau ada perkembangan yang signifikan.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak ada perkembangan yang signifikan pada penerimaan Pajak Daerah kota Jayapura sebelum otonomi khusus maupun selama otonomi khusus. Dan, tidak ada perkembangan yang signifikan pada kontribusi Pajak Daerah kota Jayapura sebelum otonomi khusus maupun selama otonomi khusus.

ABSTRACT

AN ANALYSIS ON THE REVENUE AND CONTRIBUTION INCREASE OF REGIONAL TAX BEFORE AND DURING THE SPECIAL AUTONOMY

A Case Study at The Government of Jayapura City

Dyah Hayu Susetya Dewi
002114168
Sanata Dharma University
Yogyakarta

The purpose of this research was to find out the increase of regional tax revenue and contribution before and during Special Autonomy from 1999/2000 to 2004 in Jayapura City.

The data analysis technique used the trend calculation to know the increase of the regional tax revenue and contribution before and during Special Autonomy. For the second problem, the research find out how high the regional tax contribution. Then, to find out if there were a significant increase, the research used the hyphotesist test by comparing the result of the t-table and t-calculate. If $t\text{-table} > t\text{-calculate} < t\text{-table}$, H_0 was accepted, meaning that there was not significant increase and if $-t\text{-table} < t\text{-calculate} > t\text{-table}$, H_0 was rejected or there was a significant increase.

The research result showed that there was not significant increase tax regional revenue at Jayapura City neither before nor during Special Autonomy. And, there was not significant increase tax regional contribution at Jayapura City neither before nor during Special Autonomy .

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Bapaku yang di surga dan Tuhan Yesus Kristus atas kasih setia dan berkat-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Alex Kahu Lantum MS., selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
2. Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto. M.Si., Akt., selaku ketua Jurusan Akuntansi.
3. Firma Sulistiyowati. SE., M.Si., selaku pembimbing I yang penuh dengan cinta, senyuman dan kesabaran serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
4. Drs. Y.P. Supardiyono. M.Si., Akt., selaku pembimbing II yang banyak memberikan masukan, meluangkan waktunya dan sabar dalam membimbing penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan Ilmu dan Pengetahuan selama kuliah serta masukan bagi penulis.
6. Ibu Wulan dan Bapak Achmad Bauw, serta seluruh staff dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura yang banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
7. Keluargaku yang membagikan cinta kasih, dukungan dan doanya. Papsky dan Mamsky tercinta yang menjadi motivasi bagiku dalam menyelesaikan skripsi ini. Kakakku Taufan & Mbak Widya serta keponakanku yang lucu Dhyte dan Dinda, serta adikku tersayang Hero. *I really love you so much!!!*
8. Keluarga besar Soeroso di Solo, Bogor dan Jakarta, Keluarga besar Roeroe-Dopong di Manado, Jayapura dan Merauke, Peppy & Fajar, keluarga Bapak Tukidi, keluarga Pua-Kalengkongan, keluarga Syarief-Tuela, keluarga Ngaderman, Pakde & Bude Sartono sekeluarga, Maya & Mbak Yati. *Thanks for being my family!*

9. *My bestfriend ever*; untuk Finny yang manja namun penyayang, Dede yang cuek dan nekat, Wiwiek yang keibuan, *i miss you all so much!!!*
10. Marlina “Chandy” Resubun, banyak tawa, air mata dan waktu kita lewati bersama dengan tetap bergandengan tangan bukan lagi sebagai sahabat tetapi sebagai saudara. Apabila nanti kita tidak lagi berada disatu kota yang sama, aku hanya ingin kamu mengingat bahwa aku sangat bersyukur diberikan Tuhan dirimu sebagai saudaraku. *Love u sis !!!*
11. Mbak Riana, ‘mbokeku’ yang telah mengajarku tentang kasih dari seorang saudara yang tulus tanpa pamrih dan selalu menerimaku saat aku bahagia & gila maupun saat aku menangis seperti anak kecil. Terimakasih banyak! Denok mengasihi mboke...Gbu!
12. *My Cell Group*; untuk Potter yang banyak membantuku dalam CG, *my lovely sista* Chandy ‘siomamaeee *congratulation!*’, Caravellas yang menginspirasi menjadi pribadi yang murah senyum, Keizy yang selalu membuat suasana meriah, Shizuka yang manja, Zeiya yang penuh perhatian & kayonism, Thomas; chayoo bro, Hendra yang akhirnya kita benar-benar *leader* dan anggota ;p , *thanks* berat untuk kebersamaan, kasih serta doa kalian. Kalian adalah kado terindah dari Tuhan Yesus. Runa *love you all so much!!!*
13. *My brother and sister in Jesus* ; K’Dani yang banyak mengajarku bersabar dan selalu mengandalkan Allah dalam setiap pergumulanku, Artha yang banyak mempengaruhi bertumbuh secara rohani & selalu bisa meluangkan waktunya untukku, Agnes yang penuh dengan *spirit* dan canda yang selalu kurindukan, Yenita yang centil . *Gracias!!!*
14. *JOY FELLOWSHIP*, Ibu Peggy Lowry, Rm.Tom, P’Kyung, K’Susi, B’Sopar, Mb’Yyk Kangkang, K’Flo, M’Irawan, M’Aah Kangkang, K’Nelles (seng ada obat lae kaka), Mb’Iput, M’Untung, K’Yeri, Felix, Mb’Dwie, Mb’ Deni, M’Anto, Kanaan *family*, Cie, Na ‘ntik, Cia, Vonny, Oce, Thomas, K’Devi, Bhayu, Irvan, Mike, Dani, Er(L)ni, Jonis,

Guido, Bernat, Thian Lie, Tri, Via, Ocep, Josua, Irvine, Bagus, Nael, Danger, Itho, Lea, Richard, Yeshe, Wana, Anton 'suanggi', Aria, Helty, Doni, M' Sigit, 'de Riris, Intan Togatorop (*thanks* skripsinya), *and all Joyers, Sweet Jesus love you all. JOY spirit...!!!*

15. Teman-teman Akuntansi 2000 kelas C, teman-teman KKP angkatan VII Pundong, teman-teman MPT, Julia Anne, Ella & Gendon, Menik, Siwi, alm. Christian Hardianto, trio Cimot, Tita & Okta (*'where are you guys?'*), Mario, Panda, Dewi. *God bless you!*
16. Keluarga besar Gasa Dok V Bawah Jayapura; keluarga Krimadi, keluarga Maniagasi, keluarga Derku, Makmur & Norma. Aku pengeeen banget pulang!
17. Amangboru dan Namboru-nya Artha, terima kasih banyak untuk informasi dan kuliah kilat yang dibagikan buat penulis yang sangat bermanfaat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Namun penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Yogyakarta, 16 Januari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Otonomi Khusus.....	7
B. Penerimaan Daerah.....	13
C. Pajak.....	16
D. Pajak Daerah.....	20
E. Perumusan Hipotesa.....	24



BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	25
D. Data yang dicari.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA JAYAPURA	34
A. Sejarah Terbentuknya Kota Jayapura	34
B. Lokasi dan Wilayah	38
C. Penduduk	39
D. Pendidikan	40
E. Agama	42
F. Pokok-pokok Kebijakan	43
G. Pendapatan Asli Daerah.....	45
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	49
A. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Otonomi Khusus dan Selama Otonomi Khusus	49
B. Perkembangan Kontribusi Pajak Daerah Sebelum Otonomi Khusus dan Selama Otonomi Khusus	56
BAB VI PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Keterbatasan Penelitian	65

C. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah dan Penduduk Kota Jayapura Tahun 2003.....	40
Tabel 4.2	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Dirinci Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2003.....	41
Tabel 4.3	Jumlah Perguruan Tinggi, Dosen, Mahasiswa dan Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Jayapura Tahun 2003.....	41
Tabel 4.4	Jumlah Umat Beragama di Kota Jayapura Dirinci Menurut Distrik Tahun 2002.....	42
Tabel 4.5	Jumlah Tempat Peribadatan Dirinci Menurut Distrik.....	42
Tabel 5.1	Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Selama Otonomi Khusus.....	50
Tabel 5.2	Perhitungan Trend Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Otonomi Khusus.....	50
Tabel 5.3	Perhitungan Uji 't' Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Otonomi Khusus.....	52
Tabel 5.4	Perhitungan Trend Penerimaan Pajak Daerah Selama Otonomi Khusus.....	53
Tabel 5.5	Perhitungan Uji 't' Penerimaan Pajak Daerah Selama Otonomi Khusus.....	55
Tabel 5.6	Perhitungan Trend Kontribusi Pajak Daerah Sebelum Otonomi Khusus.....	58
Tabel 5.7	Perhitungan Uji 't' Kontribusi Pajak Daerah Sebelum Otonomi Khusus.....	60
Tabel 5.8	Perhitungan Trend Kontribusi Pajak Daerah Selama Otonomi Khusus.....	61
Tabel 5.9	Perhitungan Uji 't' Kontribusi Pajak Daerah Selama Otonomi Khusus.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura Tahun 1999/2000.....	68
Lampiran 2	Daftar Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura Tahun 2000.....	71
Lampiran 3	Daftar Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura Tahun 2001.....	74
Lampiran 4	Daftar Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura Tahun 2002.....	77
Lampiran 5	Daftar Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura Tahun 2003.....	81
Lampiran 6	Daftar Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura Tahun 2004.....	85
Lampiran 7	Laporan Ringkasan Perhitungan APBD Kota Jayapura Tahun 1999/2000.....	88
Lampiran 8	Laporan Ringkasan Perhitungan APBD Kota Jayapura Tahun 2000.....	89
Lampiran 9	Laporan Ringkasan Perhitungan APBD Kota Jayapura Tahun 2001.....	90
Lampiran 10	Laporan Ringkasan Perhitungan APBD Kota Jayapura Tahun 2002.....	91
Lampiran 11	Laporan Ringkasan Perhitungan APBD Kota Jayapura Tahun 2003.....	92
Lampiran 12	Laporan Ringkasan Perhitungan APBD Kota Jayapura Tahun 2004.....	93
Lampiran 13	Tabel t.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau-pulau yang sangat luas dan memiliki berbagai suku dan budaya. Salah satu bentuk kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang lebih luas kepada daerah-daerah yang tersebar di Indonesia untuk berkreasi mengembangkan pribadinya sendiri yaitu dengan pemberian Otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang-Undang (Raksaka, 2001:139). Otonomi disini sendiri terdiri dari dua bentuk yaitu; *Otonomi Daerah* dan *Otonomi Khusus*. Otonomi Khusus menurut UU Republik Indonesia No.21 tahun 2001 adalah kewenangan khusus yang diberikan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Otonomi khusus di Indonesia sampai saat ini baru diberikan kepada 2 provinsi saja, yaitu Papua (UU No.21 Tahun 2001) dan Nangroe Aceh Darussalam (UU No.15 Tahun 2001).

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Wilayah Provinsi Papua pada saat

ini terdiri atas 12 (dua belas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, yaitu : Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Manokwari, Kota Jayapura dan kota Sorong.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam sebesar-sebesarannya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensial sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua.

Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua merupakan kota yang berada di Timur Negara Indonesia. Ciri dari kota Jayapura adalah wilayah yang dihuni oleh multi etnis dari berbagai latar belakang sosial budaya baik Papua maupun non-Papua. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah kota mendapatkan dana dari berbagai sumber, dan salah satunya bersumber dari kota itu sendiri. Sumber tersebut diambil dari penggalian potensi-potensi yang mengakibatkan pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber Penerimaan Daerah yang terdiri atas hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil laba perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan

daerah yang sah. Salah satu sumber Penerimaan Daerah terbesar adalah PAD dari sektor Pajak Daerah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan kota Jayapura agar dapat melaksanakan otonominya. Penerimaan pajak bagi kota Jayapura menjadi hal penting karena dari pajak tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan Pajak Daerah selalu mengalami perkembangan. Perkembangan yang terjadi dari tahun ke tahun dapat berupa kenaikan atau penurunan penerimaan pajak. Kenaikan atau penurunan pajak tersebut dapat dianalisis penyebabnya. Di samping itu, permasalahan yang dihadapi pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber Pajak Daerah adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, sehingga dapat diketahui analisis perkembangan penerimaan dan kontribusi Pajak Daerah sebelum dan selama Otonomi Khusus di Pemerintah Kota Jayapura.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dilakukan penelitian mengenai:

1. Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Daerah sebelum Otonomi Khusus dan selama Otonomi Khusus tahun 1999/2000 sampai dengan tahun 2004 di Pemerintah Kota Jayapura?

2. Bagaimana perkembangan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan daerah sebelum Otonomi Khusus dan selama Otonomi Khusus tahun 1999/2000 sampai dengan tahun 2004 di Pemerintah Kota Jayapura?

C. Batasan Masalah

Salah satu sumber penerimaan daerah Kota Jayapura adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Agar lebih terfokus maka peneliti membatasi pada Pajak Daerah kota Jayapura yang terdiri dari Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum dan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diangkatnya permasalahan di atas adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Daerah sebelum Otonomi Khusus dan selama Otonomi Khusus tahun 1999/2000 sampai dengan tahun 2004 di Pemerintah Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui perkembangan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan daerah sebelum Otonomi Khusus dan selama Otonomi Khusus tahun 1999/2000 sampai dengan tahun 2004 di Pemerintah Kota Jayapura.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan pengalaman di lapangan dalam menerapkan teori dan ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam studi dengan kenyataan dalam lingkungan masyarakat yang sebenarnya.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian akan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam hal Pajak Daerah.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan menambah referensi perpustakaan Universitas Sanata Dharma.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori

Landasan teori disini menguraikan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis. Teori-teori tersebut

nantinya akan dapat dijadikan sebagai landasan berpikir bagi penulis dalam mengolah data yang diperoleh dan menganalisa permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data-data yang digunakan dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari pemerintah kota Jayapura yang merupakan tempat penelitian.

Bab V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menguraikan analisis yang dilakukan penulis dalam menjawab permasalahan yang ada dan memberikan hasil dari analisis tersebut dan melakukan pembahasan data.

Bab VI : Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Khusus

1. Latar Belakang

Keputusan politik penggabungan tanah Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tahun 1963 ternyata masih belum menghasilkan kesejahteraan, kemakmuran dan pengakuan negara terhadap hak-hak dasar rakyat Papua. Kondisi masyarakat Papua dalam bidang-bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik masih sangat memprihatinkan dibandingkan dengan kesejahteraan yang dinikmati oleh sebagian besar saudara-saudaranya di Provinsi-Provinsi tertentu di Indonesia. Keadaan ini mengakibatkan munculnya berbagai ketidakpuasan yang tersebar di seluruh Tanah Papua dan diekspresikan dalam berbagai bentuk. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tidak jarang menjadi warna penyelenggaraan pembangunan di Papua. Puncaknya adalah semakin banyaknya rakyat Papua yang ingin melepaskan diri dari NKRI sebagai suatu alternatif untuk memperbaiki kesejahteraan diri sendiri (Sumule 2003: 48).

Pada tanggal 14-21 oktober 1999 berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berhasil menetapkan sejumlah ketetapan, salah satunya adalah TAP MPR RI Nomor IV tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004. Kebijakan untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia di Provinsi-Provinsi Aceh, Irian Jaya dan Maluku

dimuat dalam TAP MPR tersebut. Untuk kasus Papua ditetapkan bahwa, “...integrasi bangsa dipertahankan di dalam wadah NKRI dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah Otonomi Khusus yang diatur dengan Undang-Undang...”. Akhirnya, setelah mengalami proses yang panjang, maka pada tanggal 20 Oktober 2001, RUU Otonomi Khusus Papua disahkan oleh DPR RI, dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 21 November 2001 dengan nama Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pada tanggal 1 Januari 2002, UU tersebut secara formal berlaku di Provinsi Papua.

2. Pengertian Otonomi Khusus

Otonomi Khusus menurut UU Republik Indonesia No.21 tahun 2001 adalah kewenangan khusus yang diberikan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah.

Istilah “otonomi” dalam Otonomi Khusus haruslah diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, sekaligus pula berarti kebebasan untuk berpemerintah sendiri dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah-daerah lain di Indonesia yang memang berkekurangan. Hal lain yang tidak kalah penting

adalah kebebasan untuk menentukan strategi pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sesuai dengan karakteristik dan kekhasan sumber daya manusia serta kondisi alam dan kebudayaan orang Papua.

Istilah “khusus” hendaknya diartikan sebagai perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena kekhususan yang mencakup hal-hal seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat, kebudayaan dan sejarah politik. Dalam pengertian praktisnya, kekhususan otonomi Papua berarti bahwa ada hal-hal mendasar yang hanya berlaku di Papua dan mungkin tidak berlaku di daerah lain di Indonesia, dan ada hal yang berlaku di daerah lain di Indonesia yang tidak diterapkan di Papua.

3. Nilai-Nilai Dasar

Ada tujuh (7) butir nilai dasar Otonomi Khusus Papua, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua
- b. Demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi
- c. Penghargaan terhadap etika dan moral
- d. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia
- e. Supremasi hukum
- f. Penghargaan terhadap pluralisme
- g. Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara

4. Kerangka Dasar, (Sumule 2003: 63-99):

- a. Pembagian kewenangan antara pusat dan Provinsi Papua

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1). Politik luar negeri; Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh mengurus politik luar negeri negara, dan Provinsi Papua termasuk ke dalamnya.
- 2). Pertahanan terhadap ancaman eksternal; Pemerintah pusat bertanggung jawab penuh untuk menangkal setiap ancaman eksternal yang bertujuan untuk menghancurkan integritas NKRI.
- 3). Moneter; pada dasarnya pengaturan sistem moneter di Provinsi Papua diatur oleh Pemerintah Pusat, namun tidak menutup kemungkinan bagi Provinsi Papua untuk memiliki sistem mata uang sendiri, disamping Rupiah, apabila memang lebih memberikan keuntungan kepada rakyat dan perkembangan perekonomian Papua.
- 4). Peradilan Kasasi; proses peradilan tingkat pertama dan tingkat banding dilakukan di Provinsi Papua, sementara peradilan tingkat kasasi dilakukan di tingkat nasional.

Di luar keempat kewenangan pemerintah pusat seperti yang dikemukakan tersebut, semua kewenangan bidang pemerintahan lain menjadi urusan penuh pemerintah Provinsi Papua.

b. Pembagian kewenangan di dalam Provinsi Papua

- 1). Otonomi di dalam Provinsi Papua
- 2). Pembagian kewenangan yang tegas antara badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

c. Pembagian sumber daya

Bahwa sebagian besar kewenangan diserahkan kepada Provinsi Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, tetapi senafas dengan ini, semua potensi untuk memperoleh dana di daerah secara penuh dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua. Distribusi dan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Papua ke pusat untuk membiayai kegiatan-kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di Provinsi Papua dan tanggung jawab lain.

d. Perlindungan hak-hak adat penduduk asli

- 1). Perlindungan hak-hak adat penduduk asli atas sumberdaya alam
- 2). Perlindungan hak-hak adat penduduk asli dalam representasi publik
- 3). Perlindungan hak-hak penduduk asli dalam peradilan adat

e. Hak-hak asasi manusia dan pelurusan sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI.

f. Bendera, lambang dan lagu

Hingga saat ini Provinsi Papua digunakan bendera Merah Putih sebagai bendera negara, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia dan burung Garuda sebagai lambang negara.

g. Ekonomi dan keuangan

Prinsip yang dianut dalam pengelolaan keuangan Provinsi Papua ;

- 1). Sumber-sumber penerimaan provinsi yang berupa penerimaan asli provinsi yang terdiri dari pajak yang obyeknya berada dalam Provinsi Papua, retribusi, hasil-hasil SDA, bagian laba perusahaan

milik Provinsi, penerimaan bukan pajak dan lain-lain penerimaan Provinsi yang sah disetor ke kas Provinsi dan seluruhnya menjadi hak pemerintahan Provinsi

2). Hasil setoran diatas tadi dapat disetor ke kas Pemerintah Pusat untuk membiayai kegiatan-kegiatan Pemerintah Pusat yang besarnya tidak melebihi 20% dari setoran tersebut

h. Pemberdayaan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat

i. Kependudukan dan ketenagakerjaan

Didalam Otonomi Khusus, penempatan penduduk dari luar Papua melalui program transmigrasi nasional harus dihentikan, sebaliknya, orientasi penataan kependudukan harus dialihkan ke meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat. Dalam hal ketenagakerjaan, dengan memperhatikan kondisi nyata di masyarakat, maka orang-orang Papua asli berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk memperoleh pekerjaan dalam semua bidang berdasarkan pendidikan dan keahliannya.

j. Pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup

k. Pendidikan dan kebudayaan

l. Kesehatan dan gizi

m. Sosial

n. Keagamaan

- o. Peradilan, kejaksaan dan kepolisian.

Ketiga unsur penegak hukum ini memperoleh perhatian yang penting karena kecuali Peradilan Kasasi, semua aspek penegakan hukum lainnya, menjadi urusan dan kewenangan Pemerintahan Provinsi Papua dan diatur dalam Peraturan Provinsi.

- p. Pengawasan

- q. Kerjasama antar Provinsi dan luar negeri

Dalam rangka kerjasama tersebut Pemerintah Provinsi Papua dapat membuka kantor-kantor penghubung di negara-negara dimaksud, misalnya dalam bentuk *Desk* Provinsi Papua pada Keduataan Besar RI di manca negara.

B. Penerimaan Daerah

1. Pengertian Penerimaan Daerah

Menurut UU Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001, Penerimaan Daerah adalah suatu angka statistik yang menunjukkan nilai seluruh hasil kegiatan ekonomi daerah tertentu yang dinyatakan dalam satuan uang.

2. Sumber Penerimaan Daerah

Sumber Penerimaan Daerah berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil atau penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi dukungan untuk keperluan daerah dan sebagainya.

Berdasarkan UU Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001, sumber-sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:

- 1). Pajak Daerah menurut PP No.65 adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
- 2). Retribusi Daerah menurut PP No.66 adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.
- 3). Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan
- 4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah

b. Dana Perimbangan

Dana yang bersumber pada penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus adalah sebagai berikut:

1). Bagi hasil pajak:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan
- b) Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan, dan
- c) Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Bagi hasil sumber daya alam:

- a) Kehutanan
- b) Perikanan
- c) Pertambangan Umum
- d) Pertambangan Minyak Bumi
- e) Pertambangan Gas Alam

2). Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU yaitu dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3). Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK yaitu dana dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4). Dana tambahan dalam rangka Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan usulan pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

c. Pinjaman Daerah

Provinsi Papua dapat menerima bantuan luar negeri setelah memberitahukannya kepada Pemerintah Pusat untuk membiayai sebagian anggarannya dan mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pinjaman dari sumber dalam negeri untuk Provinsi Papua harus mendapat persetujuan dari DPRP. Total kumulatif pinjaman besarnya tidak melebihi persentase tertentu dari jumlah penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Penerimaan Daerah dalam rangka Otonomi Khusus

Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

e. Lain-lain penerimaan yang sah

Yang bersifat tidak mengikat, seperti hibah dari pihak luar.

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa/negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo & Wiryawan, 2000:2)

Pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:112) fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh: pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.

3. Jenis-jenis Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:113) jenis-jenis pajak yaitu:

a. Dilihat dari pihak yang memungut:

- 1). *Pajak Negara*: pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara kepada daerah diberikan dalam bentuk bagi hasil.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai.

- 2). *Pajak Daerah*: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan lain-lain.

b. Dilihat dari segi yang menanggung beban pajak:

- 1). *Pajak Langsung*: pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2). *Pajak Tidak Langsung*: pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

c. Dilihat dari sifatnya:

- 1). *Pajak Subyektif*: pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2). *Pajak Obyektif*: pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

4. Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1). Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

2). Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3). Stelsel Campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1). *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dengan sistem ketetapan.

2). *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3). *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

D. Pajak Daerah

Berdasarkan UU Republik Indonesia nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan;

1. Pengertian Pajak Daerah

Iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi Pajak Daerah adalah sumbangan yang diberikan suatu daerah kepada pemerintah berupa sejumlah penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Daerah.

3. Jenis-jenis Pajak Daerah

- a. Pajak Hotel dan Restoran
- b. Pajak Hiburan
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C
- f. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

4. Cara Pemungutan Pajak Daerah

- a. Tata cara perhitungan dan penetapan pajak

Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Berdasarkan SPTPD Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutang sendiri.

b. Tata cara pembayaran

Dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

c. Tata cara penagihan pajak

Surat teguran atau peringatan atau yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Apabila dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat akan segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

5. Prinsip-prinsip Umum Perpajakan Daerah

Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Adil dan merata secara vertikal, artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal. Maksudnya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- c. Administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung dan pelayanan yang memuaskan bagi si wajib pajak.

- d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- e. Non-distorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh.

Secara administratif daerah, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Pajak Daerah tingkat Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

- b. Pajak Daerah tingkat Kota/Kabupaten

Contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Ciri-ciri Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah merupakan setoran sebagian kekayaan individu/badan untuk kas negara sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- b. Sifat pungutan dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan prestasi/ imbalan kembali secara langsung.
- c. Penerimaan pajak oleh negara dipakai untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan melayani kepentingan masyarakat.

E. Perumusan Hipotesa

Menurut Boedijoewono (2001: 203) Hipotesa adalah suatu anggapan atau pendapat yang diterima secara intetip (*a tentative statement*) untuk menjelaskan suatu fakta atau yang dipakai sebagai dasar suatu penelitian.

Sebelum menerima atau menolak suatu hipotesa peneliti harus terlebih dahulu menguji validitas hipotesa. Perumusan hipotesa nol (*null hypotheses*) yang biasa dirumuskan dengan H_0 , karena hipotesa ini mempunyai perbedaan atau tidak mempunyai perbedaan dengan hipotesa yang sebenarnya. Hipotesa alternatif yang selanjutnya dirumuskan dengan H_a adalah hipotesa kerja yang dirumuskan kebalikan dari hipotesa nol (Boedijoewono, 2001: 204-205).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus yaitu penelitian yang terbatas pada obyek tertentu pada Pemerintah Kota Jayapura dengan mengumpulkan data dan kemudian diolah dan dianalisis serta selanjutnya ditarik kesimpulan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Jayapura

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama bulan Juli s/d Agustus 2005

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah data Realisasi Pajak Daerah Kota Jayapura dan data APBD

D. Data yang Dicari

1. Gambaran Umum Kota Jayapura
2. Data Realisasi Pajak Daerah Kota Jayapura
3. Data APBD



E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan memperoleh informasi secara langsung pada bagian-bagian yang berwenang atau pada sumber yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengutip data yang diperlukan seperti data APBD.

F. Teknik Analisis Data

1. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Daerah sebelum Otonomi Khusus dan selama Otonomi Khusus digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. mencari data dan informasi Pajak Daerah sebelum dan selama Otonomi Khusus yang kemudian dimasukkan ke dalam tabel berikut:

Sebelum Otonomi Khusus		Selama Otonomi Khusus	
Tahun	Penerimaan Pajak Daerah	Tahun	Penerimaan Pajak Daerah
99/00		2002	
2000		2003	
2001		2004	

b. kemudian dilakukan analisis apakah mengalami kenaikan atau penurunan dengan menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil (*The Least Square's method*), yaitu merupakan jumlah kuadrat penyimpangan (deviasi) nilai data terhadap garis trend minimum atau terkecil.

Persamaan garis trend $Y' = a + bx$

Keterangan:

Y' = Penerimaan Pajak Daerah

a = Konstanta yang akan menunjukkan besarnya harga Y apabila $x = 0$

b = Pertambahan trend secara konstan

n = Jumlah tahun.

x = Tahun yang dihitung berdasarkan tahun dasar yang akan ditentukan dari $x = 0$

Dengan metode *Least Square's* maka nilai a dan b dapat dicari dengan rumus:

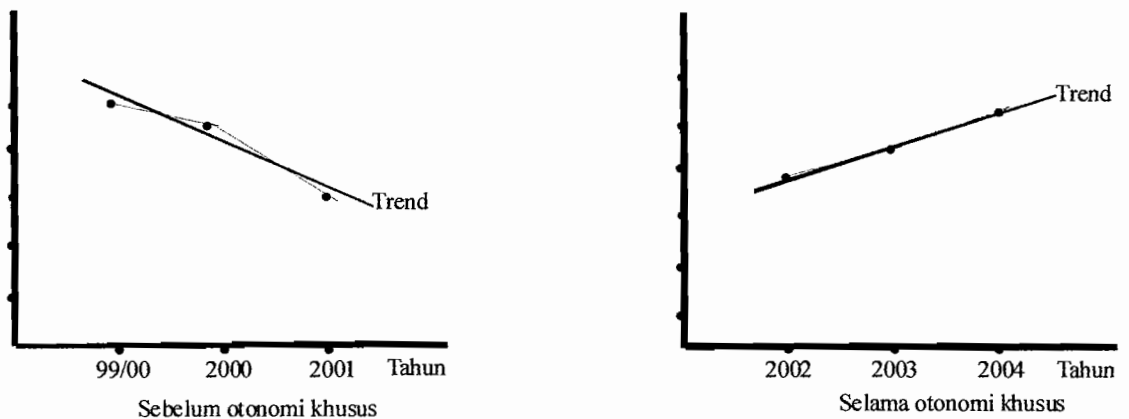
$$a = \frac{\sum y}{n}$$

dan

$$b = \frac{\sum xy}{x^2}$$

- c. setelah didapatkan hasil penghitungan trend disetiap tahunnya, kemudian hasilnya akan nampak pada tabel dan grafik trend yang akan menunjukkan perkembangannya seperti berikut ini:

Sebelum Otonomi Khusus		Selama Otonomi Khusus	
Tahun	Y'	Tahun	Y'
1999/2000		2002	
2000		2003	
2001		2004	



- d. setelah nilai trend (Y') diketahui dengan persamaan trend dan telah digambarkan kedalam grafik, kemudian dilakukan analisis bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Daerah sebelum Otonomi Khusus dan selama Otonomi Khusus. Untuk mengetahui apakah nilai 'b' signifikan atau tidak, perlu dilakukan uji 't' dengan *level of significance* 5%. Hipotesa yang diuji adalah sebagai berikut:

H_0 : $b = 0$; Tidak ada perkembangan penerimaan Pajak Daerah.

H_a : $b \neq 0$; Ada perkembangan penerimaan Pajak Daerah.

Rumus t-hitung yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{b}{S_b}$$

Dimana:

b = perubahan variabel (Y') pertahun secara berkala

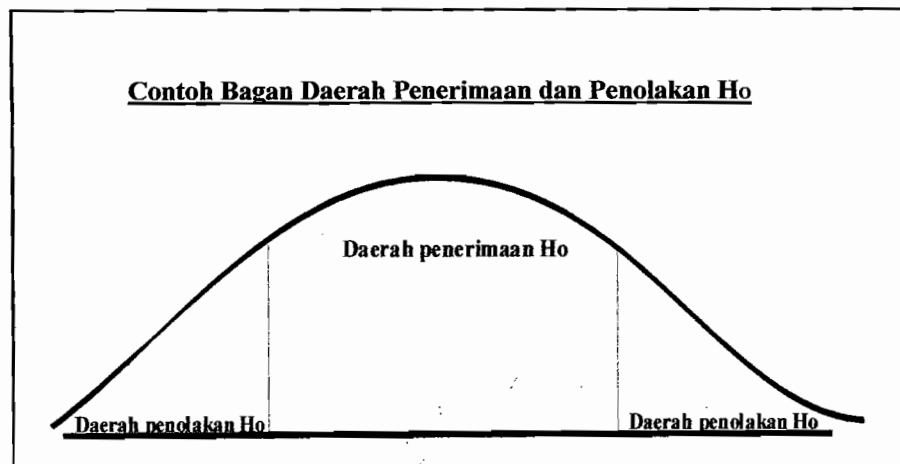
S_b = koefisien kesalahan baku.

Rumus koefisien kesalahan baku (S_b) yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$S_b^2 = \frac{S_e^2}{\sum [x - \bar{x}]^2}$$

Dimana:

$$S_e^2 = \frac{\sum (Y - Y')^2}{(N - 2)}$$



Ho diterima, jika $-t(\alpha/2; n-2) \leq t\text{-hit} \leq t(\alpha/2; n-2)$

Ho ditolak, jika $t\text{-hit} < -t(\alpha/2; n-2)$ atau $t\text{-hit} > t(\alpha/2; n-2)$

- e. kesimpulan yang dapat ditarik yaitu apabila Ho diterima maka berarti tidak terdapat perkembangan penerimaan Pajak Daerah sebelum dan selama Otonomi Khusus, sedangkan apabila Ho ditolak maka berarti terdapat perkembangan penerimaan Pajak Daerah sebelum dan selama Otonomi Khusus.

2. Untuk mengetahui perkembangan kontribusi Pajak Daerah sebelum Otonomi Khusus dan selama Otonomi Khusus digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mencari data dan informasi Pajak Daerah sebelum dan selama Otonomi Khusus.
- b. menghitung besarnya kontribusi Pajak Daerah disetiap tahun yang ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Penerimaan Daerah}} \times 100 \%$$

- c. setelah menghitung kontribusi Pajak Daerah dengan menggunakan rumus di atas disetiap masing-masing tahun yang ditetapkan, kemudian dilakukan analisis apakah mengalami kenaikan atau penurunan dengan menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil (*The Least Square's method*), yaitu merupakan jumlah kuadrat penyimpangan (deviasi) nilai data terhadap garis trend minimum atau terkecil.

Persamaan garis trend $Y' = a + bx$

Keterangan:

Y' = Kontribusi Pajak Daerah

a = Konstanta yang akan menunjukkan besarnya harga Y apabila $x = 0$

b = Pertambahan trend secara konstan

n = Jumlah tahun

x = Tahun yang dihitung berdasarkan tahun dasar yang akan ditentukan dari $x = 0$

Dengan metode *Least Square's* maka nilai a dan b dapat dicari dengan

rumus:

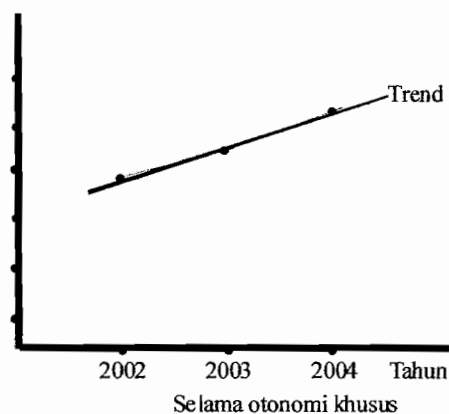
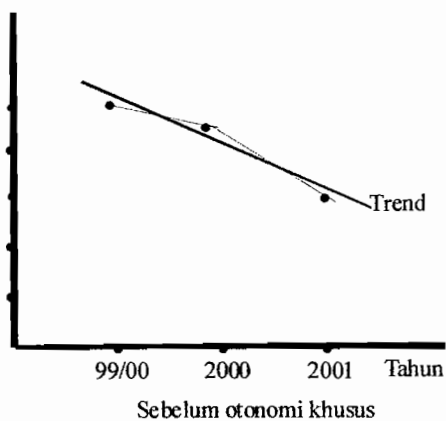
$$a = \frac{\sum y}{n}$$

dan

$$b = \frac{\sum xy}{x^2}$$

- d. setelah didapatkan hasil penghitungan trend disetiap tahunnya, kemudian hasilnya akan nampak pada tabel dan grafik trend yang akan menunjukkan perkembangannya seperti berikut ini:

Sebelum Otonomi Khusus		Selama Otonomi Khusus	
Tahun	Y'	Tahun	Y'
1999/2000		2002	
2000		2003	
2001		2004	



- e. setelah nilai trend (Y') diketahui dengan persamaan trend dan telah digambarkan kedalam grafik, kemudian dilakukan analisis bagaimana perkembangan kontribusi Pajak Daerah sebelum Otonomi Khusus dan

selama Otonomi Khusus. Untuk mengetahui apakah nilai 'b' signifikan atau tidak, perlu dilakukan uji 't' dengan *level of significance* 5%.

Hipotesa yang diuji adalah sebagai berikut:

Ho: $b = 0$; Tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Daerah.

Ha: $b \neq 0$; Ada perkembangan kontribusi Pajak Daerah.

Rumus t-hitung yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{b}{S_b}$$

Dimana : b = perubahan variabel (Y') pertahun secara berkala

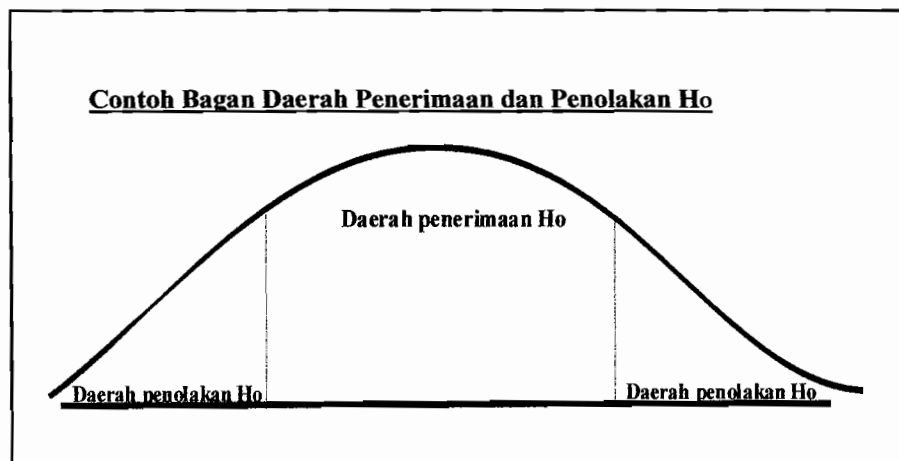
S_b = koefisien kesalahan baku.

Rumus koefisien kesalahan baku (S_b) yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$S_b^2 = \frac{S_e^2}{\sum(x - \bar{x})^2}$$

Dimana:

$$S_e^2 = \frac{\sum(Y - Y')^2}{(N - 2)}$$



H_0 diterima, jika $-t(\alpha/2; n-2) \leq t\text{-hit} \leq t(\alpha/2; n-2)$

H_0 ditolak, jika $t\text{-hit} < -t(\alpha/2; n-2)$ atau $t\text{-hit} > t(\alpha/2; n-2)$

- f. Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan pengujian diatas yaitu apabila H_0 diterima berarti tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Daerah sebelum dan selama Otonomi Khusus, sedangkan apabila H_0 ditolak maka berarti ada perkembangan kontribusi Pajak Daerah sebelum dan selama Otonomi Khusus.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA JAYAPURA

A. Sejarah Terbentuknya Kota Jayapura

Kehadiran sebuah kota memberikan fenomena munculnya pranata baru dalam masyarakat. Hal ini berarti, masyarakat yang tadi menjadi komunitas pedesaan berubah menjadi masyarakat komunitas perkotaan, namun fakta menunjukkan bahwa proses urbanisasi tidak terjadi secara mendadak dan menyeluruh, seperti yang terjadi dalam sejarah Indonesia. Banyak ciri masyarakat pedesaan masih terlihat dalam komunitas masyarakat kota, bahkan batas geografis antara kota dan desa kadang-kadang sukar ditegaskan. Hanya dalam batas wilayah administratif, batas antara kota dan desa menjadi jelas. Pada masa kolonial wilayah yang dianggap kota biasanya dibawah pengawasan langsung oleh seorang pejabat administratif kolonial.

Tumbuhnya sebuah kota yang dipengaruhi oleh situasi kolonial, dengan tahap-tahap perkembangannya bermula dari jalan raya, kemudian berdiri kantor-kantor pemerintah yang seringkali dilengkapi dengan benteng. Kota kemudian menjadi pusat pemerintahan yang merupakan bagian yang lebih luas dalam konteks politik kolonial. Disini nampak jelas bahwa kota-kota di Indonesia dipengaruhi oleh dua situasi, yaitu situasi kolonial dan situasi pascakolonig atau kemerdekaan. Kota Jayapura misalnya, sangat dipengaruhi oleh situasi kolonial, yaitu saat bangsa Belanda mengklaim tanah Papua sebagai miliknya yang sah sejak tahun 1928.

Daerah yang secara geografis terletak di bagian timur pulau Papua ini dalam perkembangannya tidak luput dari sentuhan bangsa Eropa dan Asia di antaranya: bangsa Spanyol, Jerman, Prancis, Inggris dan Belanda serta Jepang termasuk Ternate dan Tidore dari Maluku dalam hubungan atau kontak timbal balik di bidang budaya, agama, ekonomi dan politik yang berlangsung selama kurang lebih 418 tahun, yakni sejak tahun 1545-1963.

Perlu dijelaskan bahwa nama "Jayapura" berkembang dalam proses sejarah sesuai jiwa dan kehendak zaman yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Hollandia (1910)

Nama ini diberikan oleh Kaptan F.J.P. Sacle pada tanggal 7 Maret 1910 untuk daerah yang berlokasi didekat aliran sungai Anafre, Kali Ovortom sekitar taman Imbi sekarang.

2. Kota Nica (1944)

Diperkenalkan oleh tentara Nica setelah sekutu meninggalkan Papua, Kota Nica berlokasi di Sentani kompleks SPMA (sekarang kampung Harapan).

3. Nica Baru - Kota Baru (1946)

Dari Kampung Harapan, ibukota dipindahkan ke Nibi - Abei yaitu bekas kompleks RS. Ananda VII. Daerah ini sekarang adalah sekitar Abe (perumahan seberang pagar Loka Budaya Universitas Cendrawasih).

4. Hollandia - Stad - Hollandia (1951)

Ibukota keresidenan ini berlokasi di Abe, tepatnya sekitar gunung FISIP lama.

5. Kota Hollandia Binen (1955)

Posisi keresidenannya tidak berubah yaitu Abe.

6. Kota Hollandia Haven (1958)

Ibukota dipindahkan ke daerah pantai dengan pembukaan kantor gubernur dan kantor-kantor dinas di Dok II. Ibukota bernama Hollandia, istana gubernur di Hollandia Noortd Wijk. Sekarang Gedung Negara Dok V atas.

7. Kota Baru (1962)

Penyebutan nama Kota Baru mulai diberlakukan sejak pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada Komisi PBB, UNTEA pada tanggal 31 Desember 1962.

8. Sukarnopura (1964)

Penggantian nama Sukarnopura berkenaan dengan jasa-jasa Sockarno, presiden pertama RI dalam kaitan membangun solidaritas nasional Indonesia di Papua.

9. Jayapura (1968 - sekarang)

Jayapura adalah nama pengganti Sukarnopura setelah pemberontakkan G-30 S/PKI. Nama terakhir inilah yang digunakan dan berlaku resmi hingga kini.

Kota Jayapura sendiri sekarang sedang berusaha menyukseskan rencana strategis menuju kota beriman yang maju, mandiri dan sejahtera. Variabel yang menjadi kunci pokok yaitu *Maju*; maju disini dapat diartikan bergerak dinamis ke depan mengejar keberhasilan yang lebih gemilang dengan cara apa yang telah

dimiliki dipelihara terus, sedangkan yang berupa potensi diolah dengan kreatif dan inovatif sehingga menjadi suatu energi baru bagi perkembangan kota ini. *Mandiri*; dapat diartikan sebagai upaya yang memperkuat kemampuan sendiri dengan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain/luar. Mandiri itu pun dapat diukur dari banyak aspek, diantaranya aspek ekonomi. Disadari sungguh bahwa untuk membuka suatu peluang ke depan terlebih dahulu memiliki kemampuan 'modal' atau investasi. Padahal rumus ekonomi mengemukakan bahwa modal adalah selisih antara pendapatan dengan konsumsi ($Y = S - C$). Sebab itu, seseorang hanya berpeluang memperoleh modal apabila telah mampu menyisihkan sebagian dari pendapatannya sebagai tabungan. Kalaupun ada upaya-upaya pemberdayaan dari unsur di luar dirinya seperti pinjaman, bantuan dan sebagainya. Sepanjang "niat" tidak dimiliki seseorang maka dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk mempunyai modal itu. Dengan perkataan lain, "niat" atau motivasi bagi seseorang atau suatu institusi sangat penting. Karena hal itu adalah energi yang memacu jantung untuk bergerak dan berbuat sesuatu demi masa depannya. Dalam mengelola pemerintah pun seperti itu adanya, pemerintah harus selalu mampu mengelola sumber daya yang ada pada daerahnya dengan bijak dan inovatif. Pemerintah sendiri harus mampu melihat sektor apa yang harus diprioritaskan dahulu penanganannya dalam rangka menggerakkan sektor lain.

Disamping itu, pemerintah kota Jayapura menetapkan kebijakan yang menjadikan kota Jayapura sebagai pusat pemerintahan dan wilayah pengembangan di kawasan timur dan utara Provinsi Papua yaitu; memfasilitasi terwujudnya kota Jayapura sebagai kota perdagangan, pendidikan, pusat

pemerintahan, pariwisata dan jasa serta menyinergikan seluruh potensi berbagai *stakeholder* untuk terwujudnya kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

B. Lokasi dan Wilayah

Kota Jayapura berdiri sejak tanggal 21 September 1993 berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 1993 dengan status kotamadya terletak dibagian utara Provinsi Papua pada $1^{\circ}28'-3^{\circ}58' 0,82^{\circ}$ Lintang Selatan dan $137^{\circ}34' 10,6'-141^{\circ} 0^{\circ} 8,22'$ Bujur Timur. Batas wilayah administratif kota Jayapura adalah: bagian utara berbatasan dengan Lautan Pasifik; bagian selatan berbatasan dengan kecamatan (Distrik) Skamto Kabupaten Kerom; bagian timur dengan Papua New Geunie; bagian barat berbatasan dengan Distrik Sentani Timur dan Distrik Depapre Kabupaten Jayapura.

Luas kota Jayapura adalah 940 km^2 atau 94.000 ha yang terdiri atas 4 Distrik, terbagi dalam 18 kelurahan dan 13 desa (kampung). Selanjutnya topografi wilayah Jayapura cukup bervariasi, mulai dari dataran yang landai, berbukit/gunung terdapat $\pm 60\%$ areal yang tidak layak huni karena tampak perbukitan yang terjal dengan kemiringan di atas 40%, rawa-rawa berstatus konservasi atau hutan lindung. Kota Jayapura berada pada ketinggian 1-700 m di atas permukaan laut. Hanya $\pm 40\%$ lahan yang layak huni dan sebagian besar lahan tersebut terdapat di Distrik Muara Tami yang berbatasan dengan Negara Papua New Guinea.

Berdasarkan kondisi fisik dasar kota Jayapura memiliki kondisi topografi yang relatif bervariasi, baik dari pegunungan, dataran, rawa, pantai dan memiliki tingkat kelerengan dari landai sampai terjal. Kota Jayapura yang terdiri dari 4

distrik, 18 Kelurahan/ Desa dan 13 Kampung memberikan gambaran nyata lahan kondisi umum kota Jayapura secara utuh. Secara fisik wajah kota Jayapura agaknya lebih menonjol pada tiga distrik, yaitu Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan dan Abepura. Sedangkan Distrik Muara Tami kurang menonjol. Untuk itu pemerintah kota sedang berupaya agar beban yang dipikul pada jantung kota saat ini dapat lebih ringan atau dikurangi maka tidak ada pilihan lain kecuali menarik beberapa aktivitas luar kota seperti pemukiman, perdagangan dan wisata untuk dikembangkan ke kawasan timur kota Jayapura yaitu Distrik Muara Tami.

C. Penduduk

Komposisi keberadaan etnis yang menghuni kota Jayapura hampir merata dari seluruh golongan etnis di Indonesia. Keanekaragaman etnis ini merupakan sumber daya manusia (SDM) yang potensial sebagai penggerak pembangunan. Kota Jayapura yang jumlah penduduknya sebanyak 235.490 jiwa (data bulan Juli 2003) dengan kepadatan rata-rata 250 jiwa per km². Jumlah penduduk tersebut dengan rincian laki-laki sebanyak 129.974 jiwa; sedangkan perempuan sebanyak 105.516 jiwa dengan laju pertumbuhan 5,62% per tahun. Penyebaran penduduk dan luas wilayah pada masing-masing distrik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah dan Penduduk Kota Jayapura Tahun 2003 (bulan Juli)

No	Distrik	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk
1.	Jayapura Utara	51.00	83.435
2.	Jayapura Selatan	61.00	81.081
3.	Abepura	201.44	59.225
4.	Muara Tarni	626.56	11.719
Jumlah		940.00	235.490

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2003

Kebutuhan masyarakat kota Jayapura terhadap perumahan meningkat rata-rata 5% pertahun. Di kota terhadap 10 pengusaha yang bergerak di bidang properti dengan kemampuan rata-rata membangun 1000 unit rumah pertahun. Saat ini rasio antara penduduk dan rumah yang tersedia adalah 1:7,13 jiwa sedangkan yang idealnya adalah 1:5 jiwa. Dengan demikian masih diperlukan 10.951 unit rumah, maka apabila kemampuan membangun para *developer* hanya 1.000 unit rumah pertahun termasuk kebutuhan rumah. Jumlah itu baru sorotan dari sisi kuantitas belum diukur dari kualitas atau standar sehat, ini pun belum termasuk kebutuhan karena urbanisasi lokal yang membangun rumah secara tradisional ditempat kritis di wilayah kota Jayapura yang pada akhir-akhir ini trendnya meningkat cukup tinggi.

D. Pendidikan

Pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang telah dimanfaatkan oleh semua kalangan baik swasta maupun pemerintah yang selanjutnya digunakan sebagai penunjang kegiatan dalam pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kemampuan sumber daya

manusia dalam rangka menunjang proses ahli teknologi menuju terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera melalui penguasaan, pengembangan dan pendayagunaan iptek. Di kota Jayapura terdapat sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi:

Tabel 4.2
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid
Dirinci Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2003

Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
TK	37	163	3.325
SD	85	1.236	27.275
SLTP	32	738	11.225
SMU	21	593	7.395
SMK	7	216	4.438

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2003

Tabel 4.3
Jumlah Perguruan Tinggi, Dosen, Mahasiswa dan
Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Jayapura Tahun 2003

Perguruan Tinggi	Dosen	Mahasiswa	Lulusan
1. Universitas Negeri Cenderawasih	799	11.163	1.274
2. STIE Ottow & Geisler	56	1.064	79
3. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian	15	837	80
4. St. Thomas Aquinas	25	69	10
5. STFT Fajar Timur	53	990	158
6. STISIPOL SILAS Papare	170	3.070	1.167
7. USTP (Universitas Sains & Teknologi Papua)	21	80	23
8. STT Baptis Jayapura	26	750	58
9. STIFTIS Keyne	82	766	197
10. ASMI	50	872	169
11. STIE Yapis	46	568	-
12. STIE Port Numbay	27	207	-
13. Universitas Yapis Papua	20	85	20

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2003

E. Agama

Di dalam pembinaan keagamaan dan toleransi antara umat beragama yang termasuk dalam Tri kerukunan hidup beragama semakin mantap, baik kehidupan antar umat beragama, antar umat beragama dengan pemerintah. Sehingga kehidupan beragama masyarakat telah berkembang menjadi masyarakat yang religius dan peran serta umat beragama dalam pembangunan cukup tinggi khususnya pembangunan sarana dan prasarana peribadatan.

Tabel 4.4

Jumlah Umat Beragama di Kota Jayapura Dirinci Menurut Distrik Tahun 2002

No	Distrik	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
1.	Jayapura Utara	32.929	39.008	11.296	116	85	83.435
2.	Jayapura Selatan	29.270	37.048	13.514	738	511	81.081
3.	Abepura	26.100	23.481	8.409	856	408	59.255
4.	Muara Tami	7.941	2.780	971	24	3	11.719
Jumlah		96.240	102.318	34.190	1.734	1.008	235.490

Sumber: Hasil Proyeksi dari Kota Jayapura dalam angka tahun 2002

Tabel 4.5

Jumlah Tempat Peribadatan Dirinci Menurut Distrik

Distrik	Mushola	Masjid	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
Jayapura Utara	36	10	37	7	-	-
Jayapura Selatan	27	9	41	5	1	1
Abepura	24	25	38	9	-	-
Muara Tami	3	8	12	5	-	-
Jumlah	90	52	128	26	1	1

Sumber: Hasil Proyeksi data Kota Jayapura dalam angka tahun 2002

F. Pokok-Pokok Kebijakan

Pemerintah kota Jayapura telah menetapkan dan melaksanakan kebijakan strategis berupa empat misi sebagai realisasi dari makna “Kota Beriman” yang menjadi visi kota Jayapura.

Misi I (bersih, rapi, indah, manusiawi, aman dan nyaman).

- a. Membantu dan mendorong, tersedianya sarana dan prasarana rumah ibadah, sumber daya manusia, pemuka agama, sehingga dapat menyatakan kualitas moral dan iman umat penganut semua agama di kota Jayapura.
- b. Memotivasi minat dan hasrat seluruh warga kota dan pengunjung kota Jayapura agar tertanam rasa memiliki dan sadar memelihara kebersihan, kerapian, keindahan, kenyamanan dan keamanan kota Jayapura.
- c. Merencanakan, menyediakan, memelihara, dan mengendalikan seluruh fasilitas dan utilitas perkotaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- d. Mengimplementasikan rencana tata ruang wilayah kota dan pengendaliannya, sesuai fungsi serta mendorong pengembangan kota ke arah timur.

Misi II (kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dengan pemberdayaan seluruh sumber daya dan potensi daerah untuk kepentingan masyarakat).

- a. Mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh kota Jayapura sehingga secara ekonomis masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya.
- b. Mengupayakan intensifikasi dan diservifikasi pengolahan potensi serta meyakinkan pemerintah atasan dan pihak lain dengan informasi yang akurat, sehingga dana-dana khusus dapat didukung dengan alokasi program khusus.

- c. Menciptakan kemandirian tidak hanya diupayakan dari sisi kemampuan penyediaan pembiayaan pembangunan, tetapi juga potensi lain yang bernilai ekonomis dapat diproses secara energi antara potensi yang dikuasai sehingga dapat bernilai lebih tinggi. Persuasif memupus ketergantungan secara perlahan akan diupayakan secara berkesinambungan.
- d. Memprioritaskan bidang ekonomi (kesejahteraan) dan kesehatan, selain melalui upaya pada butir a,b, c tersebut di atas.
- e. Mewujudkan kemandirian dalam membangun kota Jayapura dilakukan oleh empat pihak: Pemerintah, Masyarakat, LSM dan Pengusaha.

Misi III (kota Jayapura sebagai kota perdagangan, jasa kota pendidikan, dan pariwisata).

Misi ini merupakan fungsi kota dengan ciri khas khusus, yang membedakannya dengan kota yang lain. Agar misi ini sungguh-sungguh dicapai, maka kebijakan strategis yang akan dilakukan adalah:

- a. penataan prasarana dan sarana sektor perdagangan dan jasa seperti pasar dan lainnya termasuk didalamnya peningkatan institusi yang menangani serta pembenahan manajemen;
- b. potensi pariwisata sudah harus memasuki era eksploitasi, karena eksploitasi sudah dinilai cukup. Untuk mencapai itu, sarana, prasarana, serta SDM pendukungnya ditingkatkan;
- c. sektor pendidikan seperti disinggung pada butir c angka 2 di atas, bahwa Kota Jayapura sebagai kota pendidikan harus didukung oleh sarana dan prasarana.

Misi IV (kota Jayapura sebagai pusat pemerintahan dan wilayah pengembangan)

Ada dua prioritas pada misi IV ini, yakni infra dan siprastruktur pemerintahan. Sebagai provinsi yang berkategori urban, yang akses dari satu titik ke titik lain jauh lebih mudah dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Papua. Ciri utama yang harus diciptakan dalam fungsi pusat pemerintahan ini adalah debiroktatisasi dan pelayanan prima melalui prinsip mewirauasakan birokrasi dan penguatan kelembagaan pemerintahan. Agar fungsi itu ke depan dapat lebih optimal, maka ruang gerak di pusat kota harus lebih terbuka dan tertata. Beban yang berat bagi kawasan yang sedemikian tinggi harus dirangsang ke kawasan timur. Untuk itulah berbagai sarana dan prasarana perkotaan harus lebih ditingkatkan.

G. Pendapatan Asli Daerah

Perekonomian kota Jayapura yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global, diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan. Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/ masyarakat setempat. Sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di kota Jayapura, Pemerintah berkewajiban mengalokasikan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam untuk ditabung dalam bentuk dana abadi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dimasa mendatang. Pengolahan bahan baku yang dihasilkan dari

pemanfaatan sumber daya alam misalnya; sektor migas, pertambangan umum, kehutanan, perikanan laut serta hasil-hasil pertanian pada umumnya, yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber-sumber tersebut yang berdampak positif bagi penerimaan Daerah. Data dan informasi mengenai penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Provinsi Papua disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD setiap tahun anggaran.

Sumber-sumber pendapatan asli Kota Jayapura, terdiri atas:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah.

Untuk Pajak Daerah, jenis pajak yang ditarik pemerintah kota Jayapura adalah Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan bahan Galian Golongan C dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Namun, sejak Otonomi Khusus Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan menjadi hak Pemerintah Provinsi. Untuk Retribusi Daerah yang diberlakukan di kota Jayapura diantaranya adalah Retribusi persampahan, rekreasi & olahraga, terminal, pelayanan kesehatan, penggantian biaya cetak KTP & akta catatan sipil, pasar, parkir di tepi jalan umum, penyedotan kakus, pedagang kaki lima, penumpang kapal laut dan lain-lain. Untuk Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya kota Jayapura yang dipisahkan adalah dari

Bank Pembangunan Daerah. Sedangkan untuk Lain-lain penerimaan Daerah yang sah misalnya Jasa Giro dan Penerimaan Serba-Serbi.

Penerimaan PAD kota Jayapura sebelum dan selama Otonomi Khusus selalu mengalami suatu perkembangan. Untuk masa sebelum Otonomi Khusus, pada tahun 1999/2000 target penerimaan adalah sebesar Rp.2.815.000.000,- sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.3.242.403.433,- yang berarti terjadi kelebihan penerimaan sebesar Rp.427.403.433,- Tahun 2000 realisasi penerimaan mencapai 105,53% atau Rp.2.797.617.693,- yang berarti melebihi target sebesar Rp.2.651.000.000,-. Namun, meskipun demikian penerimaan tahun 2000 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya tahun 1999/2000. Pada tahun 2001 penerimaan PAD mengalami peningkatan cukup besar dari penerimaan tahun sebelumnya, yaitu dengan realisasi sebesar Rp.4.924.923.963,- dari target sebesar Rp.4.300.000.000,- yang berarti ada kelebihan penerimaan sebesar Rp.624.923.963,-. Sedangkan untuk masa selama Otonomi Khusus, terjadi lonjakan penerimaan yang sangat besar, baik dalam penetapan targetnya maupun realisasi penerimaannya. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2002 dengan target sebesar Rp.9.901.535.000,- dan jumlah penerimaan sebesar Rp.10.991.622.150,- atau dengan tingkat prosentase penerimaan sebesar 111,01%. Peningkatan ini terutama paling nampak dalam penerimaan PAD dari Retribusi Daerah yang memberikan kontribusi paling besar. Untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2003 juga mengalami kenaikan penerimaan PAD, dimana penerimaan sebesar Rp.14.623.557.883,20 dengan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp.13.500.000.000,- maka terdapat kelebihan penerimaan sebesar

Rp.1.123.557.883,20. Ditahun 2004 kenaikan penerimaan PAD juga masih terjadi, dengan target sebesar Rp.16.568.000.000,- dan realisasi penerimaan sebesar Rp.16.664.928.845,68 maka tingkat prosentase kelebihan penerimaannya adalah sebesar 100,59%.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sumber-sumber Penerimaan Daerah meliputi PAD, Dana Perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah dan pembiayaan. Sumber PAD sendiri mencakup Pajak Daerah, Retribusi Daerah, penerimaan laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Jayapura antara lain; Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan bahan Galian Golongan C dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

A. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Otonomi Khusus dan Selama Otonomi Khusus

Untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Daerah sebelum Otonomi Khusus dan selama Otonomi Khusus digunakan langkah-langkah sebagai berikut; mencari data-data realisasi penerimaan Pajak Daerah sebelum dan selama Otonomi Khusus yang kemudian data-data tersebut dimasukkan kedalam tabel berikut:

Tabel 5.1
Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Selama Otonomi Khusus
(dalam Rupiah)

Sebelum Otonomi Khusus		Selama Otonomi Khusus	
Tahun	Penerimaan Pajak Daerah	Tahun	Penerimaan Pajak Daerah
1999/2000	1200813080,00	2002	3479145130,00
2000	1235844541,00	2003	5922067802,60
2001	2027462428,00	2004	6792029815,00

1. Perhitungan Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Otonomi Khusus.

Untuk mencari nilai dari persamaan $Y' = a + bx$, maka dihitung

Tabel 5.2

Perhitungan Trend Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Otonomi Khusus

Tahun	Y (dalam Rp)	x	x ²	xy
1999/2000	1200813080	-1	1	-1200813080
2000	1235844541	0	0	0
2001	2027462428	1	1	2027462428
Jumlah (Σ)	4464120049	0	2	826649348

$$\text{Untuk } a = \frac{4464120049}{3} = 1488040016,34$$

$$\text{Untuk } b = \frac{826649348}{2} = 413324674$$



Selanjutnya dapat dihitung trendnya; $Y' = 1488040016,34 + 413324674x$

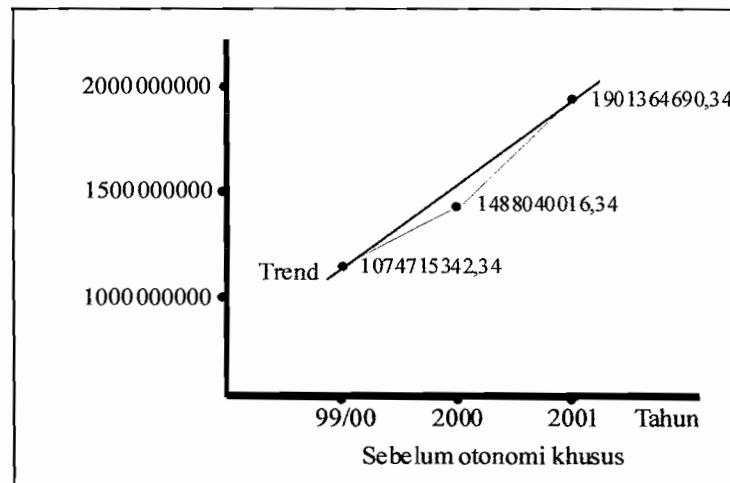
$$Y'_{99/00} = 1488040016,34 + (413324674 \times -1) = 1074715342,34$$

$$Y'_{2000} = 1488040016,34 + (413324674 \times 0) = 1488040016,34$$

$$Y'_{2001} = 1488040016,34 + (413324674 \times 1) = 1901364690,34$$

Setelah hasil perhitungan trend penerimaan Pajak Daerah dari tahun 1999/2000 sampai dengan tahun 2001 diketahui, kemudian dibuat penerapan garis trend yang dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik Trend Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Otonomi Khusus



Grafik di atas menunjukkan bahwa garis trend penerimaan Pajak Daerah sebelum Otonomi Khusus merupakan garis lurus yang sifatnya naik. Untuk mengetahui nilai 'b' signifikan atau tidak, maka kemudian dilakukan uji 't' dengan *level of significance* 5% dengan derajat kebebasan (df)n-2.

Hipotesanya adalah sebagai berikut;

a. H_0 diterima, jika $-t(\alpha/2; n-2) \leq t\text{-hit} \leq t(\alpha/2; n-2)$

H_0 ditolak, jika $t\text{-hit} < -t(\alpha/2; n-2)$ atau $t\text{-hit} > t(\alpha/2; n-2)$

b. $Y' = 1488040016,34 + 413324674x$

c. selanjutnya menentukan batas penolakan dan penerimaan H_0 , maka untuk mencari t-tabel; nilai $t(0,05/2; 3-2) = \pm 12,706$

Tabel 5.3
Perhitungan Uji 't' Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Otonomi Khusus

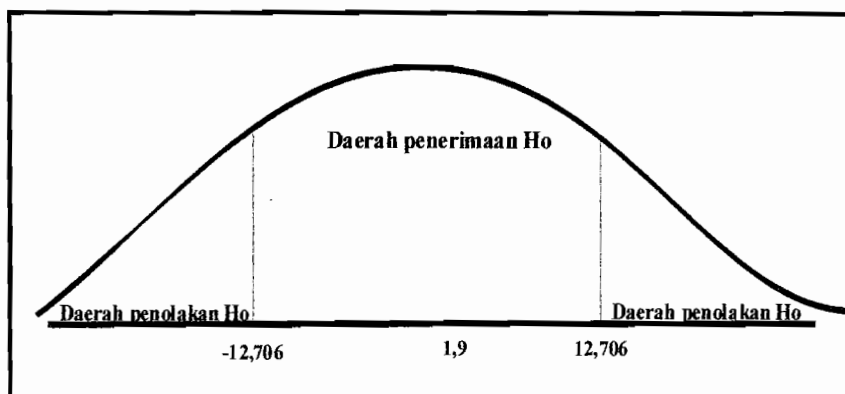
Tahun	Y	x	Y'	Y - Y'	(Y - Y') ²	x - \bar{x}	(x - \bar{x}) ²
99/00	1200813080	-1	1074715342,34	126097737,66	15900639442970182,2756	-1	1
2000	1235844541	0	1488040016,34	-252195475,34	63602557781968548,1156	0	0
2001	2027462428	1	1901364690,34	126097737,66	15900639442970182,2756	1	1
	Jml (Σ)	0			95403836667908912,6668	0	2

$$S_e^2 = \frac{\sum(Y - Y')^2}{(N - 2)} = \frac{95403836667908912,6668}{1} = 95403836667908912,6668$$

$$S_b^2 = \frac{S_e^2}{\sum(x - \bar{x})^2} = \frac{95403836667908912,6668}{2} = 47701918333954456,3334$$

$$S_b = \sqrt{47701918333954456,3334} = 218407688,36$$

$$t = \frac{b}{S_b} = \frac{413324674}{218407688,36} = 1,8924456236 \approx 1,9$$



d. $-12,706 \leq 1,9 \leq 12,706$

e. Perhitungan uji 't' menghasilkan nilai t-hitung sebesar 1,9. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung berada diantara \pm t-tabel yang nilainya

sebesar $\pm 12,706$. Berhubung t-hitung berada diantara $\pm t$ -tabel maka ini berarti tidak ada perkembangan penerimaan Pajak Daerah yang signifikan.

Kesimpulan: H_0 diterima, ini berarti tidak ada perkembangan penerimaan Pajak Daerah yang signifikan sebelum Otonomi Khusus.

2. Perhitungan Penerimaan Pajak Daerah Selama Otonomi Khusus.

Untuk mencari nilai dari persamaan $Y' = a + bx$, maka dihitung

Tabel 5.4

Perhitungan Trend Penerimaan Pajak Daerah Selama Otonomi Khusus

Tahun	Y (dalam Rp)	x	x ²	xy
2002	3479145130,00	-1	1	-3479145130,00
2003	5922067802,60	0	0	0
2004	6792029815,00	1	1	6792029815,00
Jumlah (Σ)	16193242747,60	0	2	3312884685,00

$$\text{Untuk } a = \frac{16193242747,60}{3} = 5397747582,53$$

$$\text{Untuk } b = \frac{3312884685,00}{2} = 1656442342,5$$

$$\text{Trendnya; } Y' = 5397747582,53 + 1656442342,5x$$

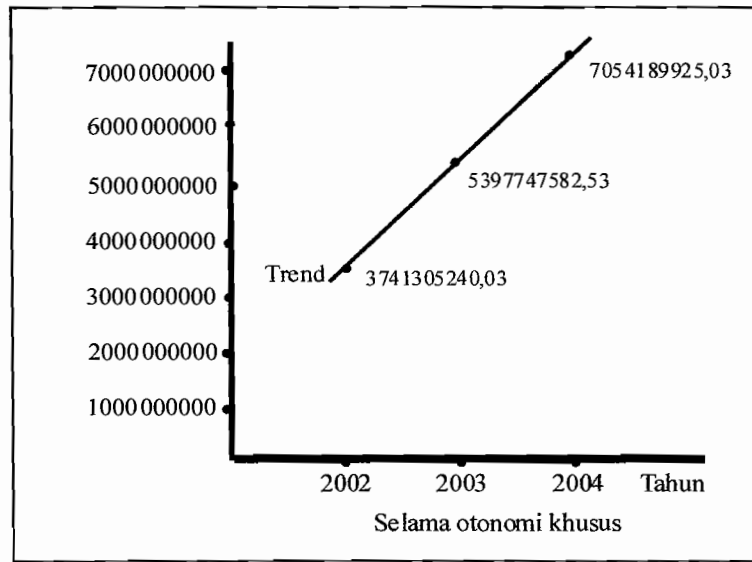
$$Y'_{2002} = 5397747582,53 + (1656442342,5 \times -1) = 3741305240,03$$

$$Y'_{2003} = 5397747582,53 + (1656442342,5 \times 0) = 5397747582,53$$

$$Y'_{2004} = 5397747582,53 + (1656442342,5 \times 1) = 7054189925,03$$

Setelah hasil perhitungan trend penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 diketahui, kemudian dibuat penerapan garis trend yang dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik Trend Penerimaan Pajak Daerah Selama Otonomi Khusus



Grafik di atas menunjukkan bahwa garis trend penerimaan Pajak Daerah selama Otonomi Khusus merupakan garis lurus yang sifatnya naik.

Hipotesanya adalah sebagai berikut ;

a. H_0 diterima, jika $-t(\alpha/2; n-2) \leq t\text{-hit} \leq t(\alpha/2; n-2)$

H_0 ditolak, jika $t\text{-hit} < -t(\alpha/2; n-2)$ atau $t\text{-hit} > t(\alpha/2; n-2)$

b. $Y' = 5397747582,53 + 1656442342,5x$

c. t-tabel ; nilai $t(0,05/2 ; 3-2) = \pm 12,706$

Tabel 5.5
Perhitungan Uji 't' Penerimaan Pajak Daerah Selama Otonomi Khusus

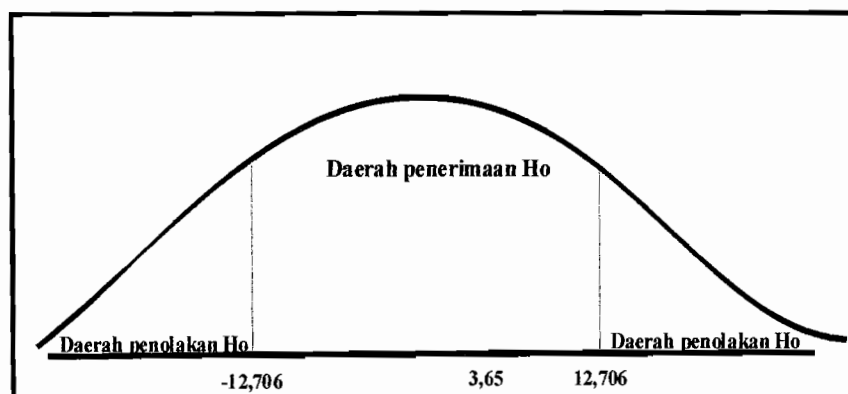
Thn	Y	x	Y'	Y - Y'	(Y - Y') ²	x - \bar{x}	(x - \bar{x}) ²
2002	3479145130,00	-1	3741305240,03	-262160110,03	68727923290941706,6009	-1	1
2003	5922067802,60	0	5397747582,53	524320220,07	274911693174253230,8049	0	0
2004	6792029815,00	1	7054189925,03	-262160110,03	68727923290941706,6009	1	1
	Jml (Σ)	0			412367539756136644,0067	0	2

$$S_e^2 = \frac{\Sigma(Y - Y')^2}{(N - 2)} = \frac{412367539756136644,0067}{1} = 412367539756136644,0067$$

$$S_b^2 = \frac{S_e^2}{\Sigma(x - \bar{x})^2} = \frac{412367539756136644,0067}{2} = 206183769878068322,00335$$

$$S_b = \sqrt{206183769878068322,00335} = 454074630,3$$

$$t = \frac{b}{S_b} = \frac{1656442342,5}{454074630,3} = 3,6479517505 \approx 3,65$$



- d. $-12,706 \leq 3,65 \leq 12,706$
- e. Perhitungan uji 't' menghasilkan nilai t-hitung sebesar 3,65. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung berada diantara \pm t-tabel yang nilainya sebesar \pm 12,706. Berhubung t-hitung berada diantara \pm t-tabel maka ini berarti tidak ada perkembangan penerimaan Pajak Daerah yang signifikan.
- Kesimpulan: H_0 diterima, ini berarti tidak ada perkembangan penerimaan Pajak Daerah yang signifikan selama Otonomi Khusus.

B. Perkembangan Kontribusi Pajak Daerah Sebelum Otonomi Khusus dan Selama Otonomi Khusus

Untuk mengetahui perkembangan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan daerah sebelum Otonomi Khusus dan selama Otonomi Khusus, maka dihitung kontribusi Pajak Daerah tiap tahun dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tahun 1999/2000} = \frac{1.200.813.080}{76.632.819.607} \times 100\% = 1,566969722\% \approx 1,57\%$$

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan daerah di tahun 1999/2000 adalah sebesar 1,57%.

$$\text{Tahun 2000} = \frac{1.235.844.541}{92.429.562.068} \times 100\% = 1,337066317\% \approx 1,34\%$$

Untuk tahun 2000 kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan daerah adalah sebesar 1,34%.

$$\text{Tahun 2001} = \frac{2.027.462.428}{141.444.104.717} \times 100\% = 1,43340183\% \approx 1,43\%$$

Untuk tahun 2001 kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan daerah adalah sebesar 1,43%.

$$\text{Tahun 2002} = \frac{3.479.145.130}{229.067.117.332} \times 100\% = 1,518832197\% \approx 1,52\%$$

Untuk tahun 2002 kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan daerah adalah sebesar 1,52%.

$$\text{Tahun 2003} = \frac{5.922.067.802,60}{271.695.170.409} \times 100\% = 2,179673563\% \approx 2,18\%$$

Untuk tahun 2003 kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan daerah adalah sebesar 2,18%.

$$\text{Tahun 2004} = \frac{6.791.729.340}{258.902.169.479} \times 100\% = 2,623280197\% \approx 2,62\%$$

Dan untuk tahun 2004 kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan daerah adalah sebesar 2,62%.

Setelah didapatkan hasil penghitungan kontribusi Pajak Daerah di setiap tahunnya, kemudian untuk mencari nilai dari persamaan $Y' = a + bx$, maka dilakukan langkah berikut:

1. Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Sebelum Otonomi Khusus

Tabel 5.6

Perhitungan Trend Kontribusi Pajak Daerah Sebelum Otonomi Khusus

Tahun	Y (dalam %)	x	x ²	xy
1999/2000	1,57	-1	1	-1,57
2000	1,34	0	0	0
2001	1,43	1	1	1,43
Jumlah (Σ)	4,34	0	2	-0,14

$$\text{Untuk } a = \frac{4,34}{3} = 1,44666666667 \approx 1,45$$

$$\text{Untuk } b = \frac{-0,14}{2} = -0,07$$

Setelah nilai a dan b diketahui, selanjutnya dengan mengganti nilai x dapat dihitung trendnya : $Y' = 1,45 + (-0,07) x$

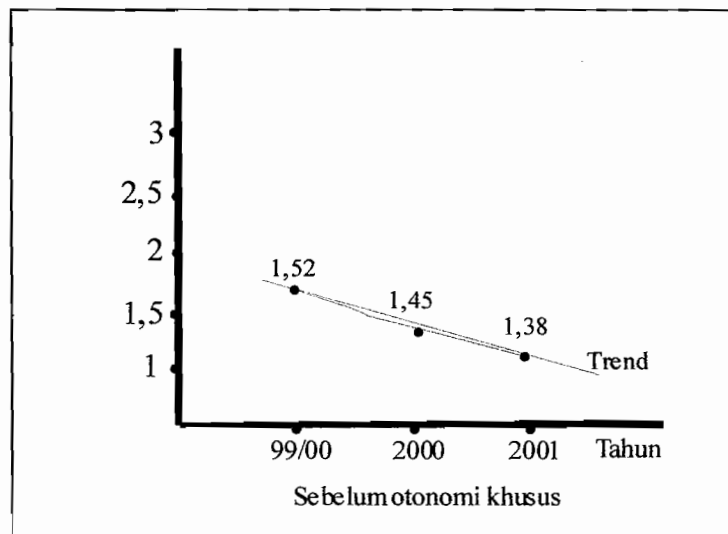
$$Y' \text{ 1999/2000} = 1,45 + (-0,07 \times -1) = 1,52$$

$$Y' \text{ 2000} = 1,45 + (-0,07 \times 0) = 1,45$$

$$Y' \text{ 2001} = 1,45 + (-0,07 \times 1) = 1,38$$

Setelah hasil perhitungan trend kontribusi Pajak Daerah dari tahun 1999/2000 sampai dengan tahun 2001 diketahui, kemudian dibuat penerapan garis trend yang dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik Trend Kontribusi Pajak Daerah Sebelum Otonomi Khusus



Grafik di atas menunjukkan bahwa garis trend kontribusi Pajak Daerah sebelum Otonomi Khusus merupakan garis lurus yang sifatnya turun.

Hipotesis dan perhitungannya adalah sebagai berikut;

a. H_0 diterima, jika $-t(\alpha/2; n-2) \leq t\text{-hit} \leq t(\alpha/2; n-2)$

H_0 ditolak, jika $t\text{-hit} < -t(\alpha/2; n-2)$ atau $t\text{-hit} > t(\alpha/2; n-2)$

b. $Y' = 1,45 + (-0,07) x$

c. dengan *level of significance* 5%, selanjutnya menentukan batas penolakan dan penerimaan H_0 , maka dapat dipilih sebagai berikut;

Untuk mencari t-tabel; nilai $t(0,05/2; 3-2) = \pm 12,706$

Tabel 5.7
Perhitungan Uji 't' Kontribusi Pajak Daerah Sebelum Otonomi Khusus

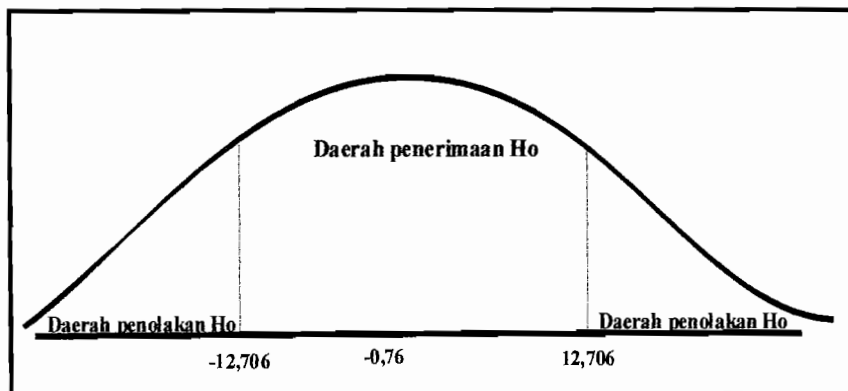
Tahun	Y	x	Y'	Y - Y'	(Y - Y') ²	x - \bar{x}	(x - \bar{x}) ²
99/00	1,57	-1	1,52	0,05	0,0025	-1	1
2000	1,34	0	1,45	-0,11	0,0121	0	0
2001	1,43	1	1,38	0,05	0,0025	1	1
	Jml (Σ)	0			0,0171	0	2

$$S_e^2 = \frac{\Sigma(Y - Y')^2}{(N - 2)} = \frac{0,0171}{1} = 0,0171$$

$$S_b^2 = \frac{S_e^2}{\Sigma(x - \bar{x})^2} = \frac{0,0171}{2} = 0,00855$$

$$S_b = \sqrt{0,00855} = 0,0924662100 \approx 0,092$$

$$t = \frac{b}{S_b} = \frac{-0,07}{0,092} = -0,76086956521 \approx -0,76$$



d. $-12,706 \leq -0,76 \leq 12,706$

e. Perhitungan uji 't' menghasilkan nilai t-hitung sebesar -0,76. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung berada diantara \pm t-tabel yang nilainya

sebesar $\pm 12,706$. Berhubung t-hitung berada di antara $\pm t$ -tabel maka ini berarti tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Daerah yang signifikan.

Kesimpulan : H_0 diterima, ini berarti tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Daerah yang signifikan sebelum Otonomi Khusus.

2. Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Selama Otonomi Khusus

Tabel 5.8

Perhitungan Trend Kontribusi Pajak Daerah Selama Otonomi Khusus

Tahun	Y (dalam %)	x	x ²	xy
2002	1,52	-1	1	-1,52
2003	2,18	0	0	0
2004	2,62	1	1	2,62
Jumlah (Σ)	6,32	0	2	1,1

$$\text{Untuk } a = \frac{6,32}{3} = 2,10666666666667 \approx 2,11$$

$$\text{Untuk } b = \frac{1,1}{2} = 0,55$$

Selanjutnya dapat dihitung trendnya : $Y' = 2,11 + 0,55 x$

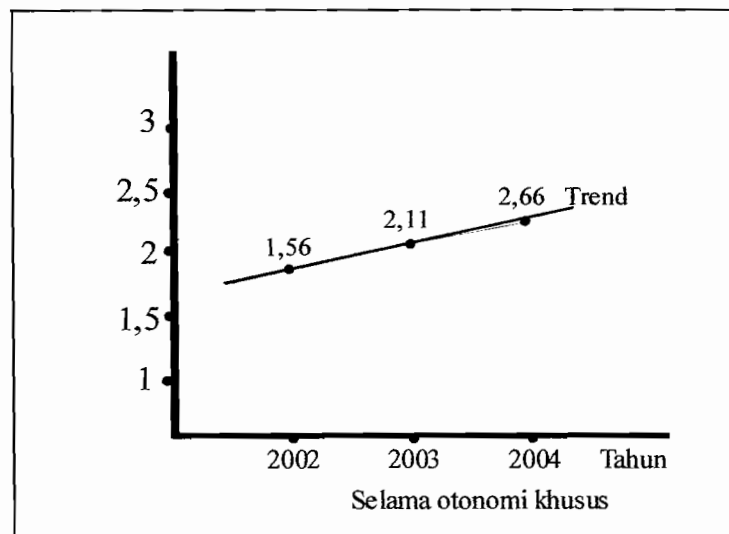
$$Y'_{2002} = 2,11 + (0,55 \times -1) = 1,56$$

$$Y'_{2003} = 2,11 + (0,55 \times 0) = 2,11$$

$$Y'_{2004} = 2,11 + (0,55 \times 1) = 2,66$$

Setelah hasil perhitungan trend kontribusi Pajak Daerah dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 diketahui, kemudian dibuat penerapan garis trend yang dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik Trend Kontribusi Pajak Daerah Selama Otonomi Khusus



Grafik di atas menunjukkan bahwa garis trend kontribusi Pajak Daerah selama Otonomi Khusus merupakan garis lurus yang sifatnya naik.

Hipotesanya adalah sebagai berikut;

a. H_0 diterima, jika $-t(\alpha/2; n-2) \leq t\text{-hit} \leq t(\alpha/2; n-2)$

H_0 ditolak, jika $t\text{-hit} < -t(\alpha/2; n-2)$ atau $t\text{-hit} > t(\alpha/2; n-2)$

b. $Y' = 2,11 + 0,55 x$

c. selanjutnya menentukan batas penolakan dan penerimaan H_0 , maka dapat dipilih sebagai berikut:

Untuk mencari t-tabel; nilai $t(0,05/2 ; 3-2) = \pm 12,706$

Tabel 5.9
Perhitungan Uji 't' Kontribusi Pajak Daerah Selama Otonomi Khusus

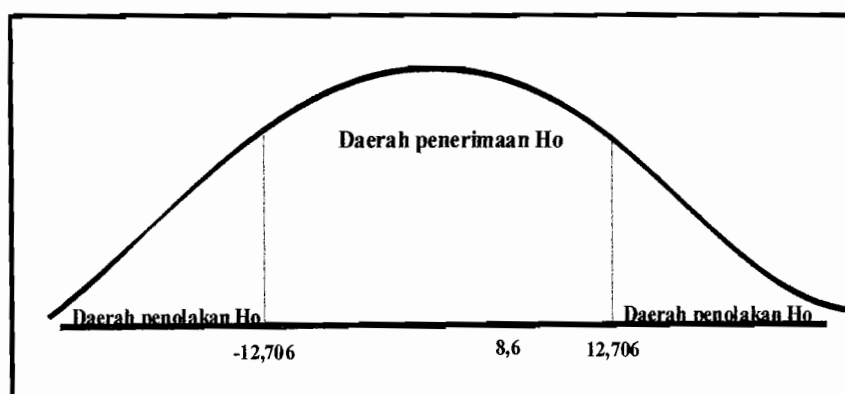
Tahun	Y	x	Y'	Y - Y'	(Y - Y') ²	x - \bar{x}	(x - \bar{x}) ²
2002	1,52	-1	1,56	-0,04	0,0016	-1	1
2003	2,18	0	2,11	0,07	0,0049	0	0
2004	2,62	1	2,66	-0,04	0,0016	1	1
	Jml (Σ)	0			0,0081	0	2

$$S_e^2 = \frac{\Sigma(Y - Y')^2}{(N - 2)} = \frac{0,0081}{1} = 0,0081$$

$$S_b^2 = \frac{S_e^2}{\Sigma(x - \bar{x})^2} = \frac{0,0081}{2} = 0,00405$$

$$S_b = \sqrt{0,00405} = 0,063639610306 \approx 0,064$$

$$t = \frac{b}{S_b} = \frac{0,55}{0,064} = 8,59375 \approx 8,6$$



d. $-12,706 \leq 8,6 \leq 12,706$

e. Perhitungan uji 't' menghasilkan nilai t-hitung sebesar 8,6. hal ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung berada diantara \pm t-tabel yang nilainya

sebesar $\pm 12,706$. Berhubung t-hitung berada diantara $\pm t$ -tabel maka ini berarti tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Daerah yang signifikan.

Kesimpulan : H_0 diterima, ini berarti tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Daerah yang signifikan selama Otonomi Khusus.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hasil analisis data diperoleh nilai t-hitung berada diantara 6t-tabel yang nilainya sebesar 612,706. Berhubung t-hitung berada di antara 6t-tabel, ini berarti tidak ada perkembangan penerimaan Pajak Daerah yang signifikan sebelum maupun selama Otonomi Khusus.
2. Hasil analisis data diperoleh nilai t-hitung berada diantara 6t-tabel yang nilainya sebesar 612,706. Berhubung t-hitung berada di antara 6t-tabel, ini berarti tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Daerah yang signifikan sebelum maupun selama Otonomi Khusus.

B. Keterbatasan Penelitian

Daftar target dan realisasi PAD dan laporan ringkasan perhitungan APBD tahun 2005 tidak dapat diperoleh karena baru keluar setelah penelitian berakhir. Hal ini menyebabkan periode penelitian selama Otonomi Khusus hanya 3 tahun saja, yaitu tahun 2002, 2003 dan 2004.

C. Saran

Dari penjelasan di atas penulis dapat memberikan saran-saran bagi peneliti berikutnya sebagai berikut:

1. Jumlah tahun data yang di ambil ada baiknya di tambah sehingga akan lebih memudahkan dan memperjelas dalam membaca hasil perhitungan trend, misalnya minimal 5 tahun.
2. Untuk peneliti selanjutnya ada baiknya melakukan pengujian atau penelitian dengan memperhatikan terlebih dahulu tahun yang akan di jadikan penelitian atau melakukan penelitian pada akhir tahun pembuatan laporan daftar target dan realisasi PAD dan laporan ringkasan perhitungan APBD sehingga tidak terjadi kekurangan data karena data yang diinginkan belum selesai dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi FE-UGM.
- Boedijoewono, Noegroho. (2001). *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*, jilid 2. (Edisi revisi). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Devas, Nick. (1987). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Djarwanto, Pangestu. (1994). *Statistik Induktif*. Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. (Edisi 1). Yogyakarta: BPFE.
- Mamesah, D.J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Parera, H. Fransiskus. (2002). Analisis Perbandingan Pajak Daerah Sebelum dan Selama Otonomi Daerah. *Skripsi* Universitas Sanata Dharma.
- Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang No.34 tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang No.21 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.
- Soemitro, Rachmad. (1990). *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: PY. Eresi.
- Sumule, Agus. (2003). *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, Teddy. (2004). Analisis Perkembangan Tingkat Kesehatan BPR Dengan Metode Camel Rating System. *Skripsi* Universitas Sanata Dharma.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Zandjani, Amadhi Chairul Tubagus. (1992). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

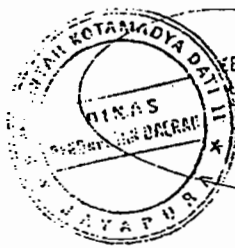
LAMPIRAN

KODE	NAMA	REKAPITULASI PERALIHAN				KETERANGAN
		2014	2015	2016	2017	
11.1	LEBIH PERMINTAAN ANGGARAN TAHAP I	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
11.2	PESAMPATAN ASLI DAERAH	1.815.000.000,00	1.829.679.791,00	1.812.727.662,00	1.242.403.452,00	596.266.348,00
11.2.1	PAJAK DAERAH	1.190.000.000,00	1.051.933.162,00	1.074.879.918,00	1.200.813.000,00	10.013.000,00
11.2.1.001	:Pajak Hotel dan Restoran	535.000.000,00	64.520.997,00	476.531.243,00	541.052.130,00	6.032.150,00
11.2.1.002	:Pajak Hiburan	60.000.000,00	4.050.000,00	37.435.500,00	41.485.500,00	10.514.500,00
11.2.1.003	:Pajak Reklame	100.000.000,00	12.432.000,00	143.094.655,00	156.526.655,00	26.526.655,00
11.2.1.004	:Pajak Penerangan Jalan Umum	405.000.000,00	42.607.905,00	417.664.185,00	460.272.090,00	55.272.090,00
11.2.1.005	:Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian :Sulongan C	50.000.000,00	1.022.350,00	154.335,00	1.176.685,00	48.823.315,00
11.2.1.006	:Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	10.000.000,00	300.000,00	-	300.000,00	3.700.000,00
11.2.2	RETRIBUSI DAERAH	1.458.000.000,00	1.068.943.350,00	1.019.685.665,00	1.146.669.915,00	140.572.715,00
11.2.2.001	:Retribusi Pelayanan Kesehatan	40.000.000,00	3.276.000,00	44.092.815,00	47.371.715,00	7.371.715,00
11.2.2.002	:Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	300.000.000,00	37.124.000,00	332.123.000,00	389.247.000,00	39.247.000,00
11.2.2.003	:Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta :Catatan Sipil	200.000.000,00	13.861.000,00	88.416.750,00	102.277.750,00	97.722.750,00
11.2.2.004	:Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	15.000.000,00	1.310.000,00	10.060.000,00	11.370.000,00	3.600.000,00
11.2.2.005	:Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	70.000.000,00	3.570.000,00	49.147.500,00	52.717.500,00	17.082.500,00
11.2.2.006	:Retribusi Pasar	165.000.000,00	21.532.000,00	162.028.000,00	183.560.000,00	18.560.000,00
11.2.2.007	:Retribusi Terminal	275.000.000,00	2.750.000,00	43.985.000,00	46.735.000,00	328.245.000,00
11.2.2.008	:Retribusi Penggantian Rukus	15.000.000,00	750.000,00	4.950.000,00	5.700.000,00	9.300.000,00
11.2.2.009	:Retribusi Pemak Potong Mekan	5.000.000,00	700.000,00	8.763.000,00	9.463.000,00	4.463.000,00
11.2.2.010	:Retribusi Pengambilan Limbah Cair	20.000.000,00	-	1.700.000,00	1.700.000,00	28.300.000,00
11.2.2.011	:Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	150.000.000,00	21.046.450,00	82.609.600,00	105.156.000,00	44.140.000,00
11.2.2.012	:Retribusi Ijin Tempat Penjualan Beralkohol	2.000.000,00	500.000,00	23.600.000,00	24.100.000,00	19.100.000,00
11.2.2.013	:Retribusi Ijin Bangunan	100.000.000,00	16.701.000,00	88.130.000,00	104.831.000,00	4.831.000,00
11.2.2.014	:Retribusi Ijin Drayak	25.000.000,00	3.560.000,00	58.980.000,00	62.440.000,00	22.540.000,00
11.2.3	PERKERJIAN LAJAK UMUM DAERAH	75.000.000,00	-	72.318.400,00	72.318.400,00	2.681.600,00
11.2.3.001	Perjanjian Kerjasama Daerah	75.000.000,00	-	72.318.400,00	72.318.400,00	2.681.600,00
11.2.4	PERKERJIAN LAJAK LAIN	90.000.000,00	78.709.079,00	45.043.079,00	307.000.000,00	778.100.000,00
11.2.4.001	Laju Hilo	40.000.000,00	277,00	6.755.254,00	6.755.254,00	71.041.249,00
11.2.4.002	Laju Selay	50.000.000,00	78.708.782,00	38.287.825,00	300.244.746,00	706.058.751,00

PENERIMAAN YANG BERASAL DARI PEMERINTAH PENERIMAAN											
11.1	DAFTAR PENDAPAT YANG BERASAL DARI PEMERINTAH	78.276.718.848.00	126.000.914.00	122.276.118.459.00	133.910.952.373.00	46.24	144.462.654.000.00	126.000.914.00	(44.343.760.427.00)		
11.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.037.000.000.00	10.047.960.00	9.576.413.959.00	9.838.461.919.00	100	10.047.960.00	10.047.960.00	(2.799.000.000.00)		
11.1.2	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.107.500.000.00	146.722.378.00	9.097.463.507.00	2.440.160.585.00	48.81	744.332.415.00				
11.1.2.1	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	100.000.000.00		150.226.453.00	150.226.453.00	100.00		6.226.453.00			
11.1.2.2	Pajak Tanah Bekas Kebakaran Perseorangan	1.000.000.000.00	146.722.378.00	8.947.237.054.00	2.289.934.132.00	48.81	744.105.962.00				
11.1.3	DANA BAKU SUGA PADAN	1.070.000.000.00	10.426.054.00	1.060.908.200.00	1.049.334.254.00	49.57	76.947.692.00	10.282.146.00	(20.665.741.00)		
11.1.3.1	Dana Hasil Nukan (Tanah)	100.000.000.00	19.745.344.00	19.302.764.00	26.050.108.00	29.05	70.947.692.00				
11.1.3.2	Pemberian Hak Atas Tanah Negara	10.000.000.00	1.676.710.00	44.037.024.00	45.713.754.00	228.57		25.713.734.00			
11.1.3.3	Penerimaan dari Iuran Gharoiti "Paya" di	1.150.000.000.00	177.000.000.00	2.997.568.412.00	3.174.568.412.00	100.78		24.568.412.00			
11.3.3	DANA RUTIN DAERAH	124.156.074.800.00	166.359.900.00	129.101.230.600.00	120.287.570.700.00	77.56	5.952.874.100.00	82.390.000.00	(5.870.484.100.00)		
11.3.3.1	Dana Belanja Pegawai	124.166.477.000.00	-	118.577.281.000.00	118.577.281.000.00	76.23	5.791.212.000.00				
11.3.3.2	Dana Belanja Non Pegawai	604.911.000.00	62.390.000.00	604.911.000.00	607.391.000.00	110.57		62.390.000.00			
11.3.3.3	Dibutangan lainnya dari Pemerintah	119.802.000.00	3.969.900.00	303.969.900.00	307.939.800.00	96.35	11.662.200.00				
11.3.3.4	Dana Rutin dari Dati I Irian Jaya	865.065.000.00	100.000.000.00	615.068.900.00	715.068.900.00	82.66	149.999.900.00				
11.3.4	DANA PEMBANGUNAN DAERAH	140.191.138.000.00	-	6.537.565.500.00	6.537.565.500.00	15.50	135.653.572.500.00				
11.3.4.1	Dana Pembangunan Daerah	140.191.138.000.00	-	4.827.565.500.00	4.827.565.500.00	11.93	135.653.572.500.00				
11.3.4.2	Dana Pembangunan Dari Dati I	1.710.000.000.00	-	1.710.000.000.00	1.710.000.000.00	100.00					
11.5	URUSAN KAS DAN PERKITUNGAN	2.924.523.000.00	-	-	-	-	2.924.523.000.00				
11.5.1	Dana Wajib Pegawai (IWP)	838.210.000.00	-	-	-	-	838.210.000.00				
11.5.2	Penerimaan Potongan Bérés	1.011.307.000.00	-	-	-	-	1.011.307.000.00				
11.5.3	Penerimaan Pajak Penghasilan	925.006.000.00	-	-	-	-	925.006.000.00				
11.5.4	Potongan Tabungan uang muka perusahaan pegawai	150.000.000.00	-	-	-	-	150.000.000.00				
REKAPITULASI											
11.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	1.202.251.150.00	-	1.202.251.150.00	1.202.251.150.00	100.00					
11.1.2.1	Pajak Daerah	1.199.000.000.00	126.933.162.00	1.074.879.916.00	1.299.813.660.00	100.91	77.637.815.00	67.850.895.00			
11.1.2.2	Retribusi Daerah	1.450.000.000.00	126.933.162.00	1.019.685.665.00	1.146.669.015.00	78.65	451.903.700.00	140.572.715.00	(311.330.995.00)		
11.1.2.3	Penerimaan Laba Usaha Daerah	75.000.000.00	-	72.318.406.00	72.318.406.00	76.42	2.681.600.00		(2.681.600.00)		
11.1.2.4	Penerimaan lain-lain	92.000.000.00	775.759.279.00	45.843.679.00	822.602.958.00	894.15	35.243.249.00	765.846.207.00	730.602.958.00		
11.1.3.1	Pagi Hasil Pajak	6.037.000.000.00	10.047.960.00	9.576.413.959.00	9.838.461.919.00	57.83	2.805.264.534.00	6.226.453.00	(2.799.036.081.00)		
11.1.3.2	Pagi Hasil Pajak Bukan Pajak	1.070.000.000.00	10.426.054.00	1.060.908.200.00	1.049.334.254.00	99.37	76.947.692.00	50.282.146.00	(20.665.746.00)		
11.1.3.3	Dana Rutin Daerah	16.156.074.800.00	166.359.900.00	129.101.230.600.00	120.287.570.700.00	77.56	5.952.874.100.00	82.390.000.00	(5.870.464.100.00)		
11.1.3.4	Dana Pembangunan Daerah	140.191.138.000.00	-	6.537.565.500.00	6.537.565.500.00	15.50	135.653.572.500.00				
11.5	URUSAN KAS DAN PERKITUNGAN	2.924.523.000.00	-	-	-	-	2.924.523.000.00				

	3	6	7	8	10	11
Jumlah	180.198.436.909.00	11.662.509.705.00	135.691.897.271.00	108.357.606.576.00	40.000.47.974.048.000.00	1.133.168.416.00
Di luar lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu	1.202.251.150.00		1.202.251.150.00	1.202.251.150.00		
Kelembagaan Asli Daerah	2.712.727.662.00	11.009.079.791.00	2.712.727.662.00	2.712.727.662.00	117.111.000.000.00	407.402.450.00
Kelembagaan yang berasal dari retribusi daerah/instansi yang lebih tinggi	107.276.178.459.00	11.036.033.914.00	107.276.178.459.00	107.276.178.459.00	40.000.44.487.659.000.00	102.970.579.00
Kelembagaan dan Perhitungan	1.202.251.150.00		1.202.251.150.00	1.202.251.150.00		
Jumlah	180.198.436.909.00	11.662.509.705.00	135.691.897.271.00	108.357.606.576.00	40.000.47.974.048.000.00	1.133.168.416.00

Jayapura, 3 April 2000



KEPALA DINAS KELEMBAGAAN DAERAH
KOTAMADYA DAIRI II JAYAPURA

[Signature]

Drs. MARTIN MAX SUEBU
P E N S I H A
NIP. 640074102

DAFTAR LAPORAN REALISASI PENERIMAAN ASLI DAERAH
KOTA JAYAPURA
BULAN : DESEMBER 2000

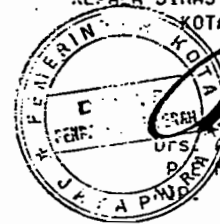
NO.	URUT	AYAT	URAIAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			
					BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	%
1	2		3	4	5	6	7	8
			1.1.1: SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU					
			1.2: PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.651.000.000.00	430.336.004.00	2.117.257.429.00	2.797.617.693.00	105.53
I			1.2.1: PAJAK DAERAH	1.035.000.000.00	142.100.748.00	1.095.743.793.00	1.235.844.541.00	122.85
	1	004	: Pajak Hotel dan Restoran	500.000.000.00	77.770.406.00	549.568.163.00	627.338.569.00	125.47
	2	005	: Pajak Hiburan	25.000.000.00	4.640.000.00	27.305.000.00	27.945.000.00	111.78
	3	006	: Pajak Reklame	120.000.000.00	6.387.500.00	126.600.550.00	132.988.150.00	110.82
	4	007	: Pajak Penerangan Jalan Umum	330.000.000.00	51.409.060.00	384.341.515.00	435.750.575.00	132.05
	5	008	: Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	25.500.000.00	-	2.394.450.00	2.394.450.00	9.39
	6	009	: Pajak Pemfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan	5.500.000.00	1.293.782.00	7.534.015.00	9.427.797.00	171.41
II			1.2.2: RETRIBUSI DAERAH	1.540.000.000.00	148.475.245.00	1.142.966.799.00	1.291.442.044.00	83.86
	1	001	: Retribusi Pelayanan Kesehatan	35.000.000.00	5.846.795.00	35.308.599.00	41.155.394.00	117.59
	2	002	: Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	430.000.000.00	27.390.000.00	352.905.950.00	380.285.950.00	88.44
	3	003	: Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	50.000.000.00	8.578.000.00	101.450.500.00	110.028.500.00	137.54
	4	004	: Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	7.500.000.00	425.000.00	3.835.000.00	9.260.000.00	123.47
	5	005	: Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	35.000.000.00	16.866.600.00	37.372.000.00	54.238.600.00	154.97
	6	006	: Retribusi Pasar	175.000.000.00	21.731.300.00	160.300.000.00	182.031.300.00	104.02
	7	014	: Retribusi Terminal	240.000.000.00	13.304.050.00	37.785.000.00	81.092.050.00	33.79
	8	018	: Retribusi Penyedotan Kakus	5.000.000.00	-	3.750.000.00	3.750.000.00	75.00
	9	019	: Retribusi Rumah Potong Hewan	7.500.000.00	2.200.000.00	5.900.000.00	8.100.000.00	108.00
	10	023	: Retribusi Pengolahan Limbah Cair	4.000.000.00	-	-	-	-
	11	026	: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	150.000.000.00	29.563.750.00	84.064.050.00	113.627.800.00	75.75
	12	027	: Retribusi Ijin Tempat Penjualan Beralkohol	21.000.000.00	500.000.00	15.100.000.00	15.600.000.00	74.29
	13	028	: Retribusi Ijin Gangguan	300.000.000.00	19.969.750.00	240.092.700.00	260.062.450.00	86.69
	14	029	: Retribusi Izin Trayek	50.000.000.00	2.110.000.00	30.100.000.00	32.210.000.00	64.42
III			1.2.3: PENERIMAAN LABA USAHA DAERAH	70.000.000.00	104.300.000.00	-	104.300.000.00	149.00
	1	001	: Bank Pembangunan Daerah	70.000.000.00	104.300.000.00	-	104.300.000.00	149.00
IV			1.2.4: PENERIMAAN LAIN-LAIN	35.000.000.00	35.454.271.00	130.576.837.00	166.031.108.00	474.37
	1	002	: Jasa Giro	5.000.000.00	5.077.00	27.846.049.00	27.851.126.00	557.02
	2	009	: Serba-serbi	30.000.000.00	35.449.194.00	102.730.788.00	138.179.982.00	460.60

	3	4	5	6	7	8
1.3 :PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH: :ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	: 90,210,845,530.00	: 9,992,402,649.00	: 73,410,291,263.00	: 83,402,693,912.00	: 92.45	:
1.3.1: BAGI HASIL PAJAK	: 4,337,412,030.00	: 875,749,834.00	: 3,042,913,354.00	: 3,918,663,188.00	: 90.35	:
001 :Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	: 3,090,548,030.00	: 15,547,099.00	: 2,934,264,026.00	: 2,949,911,125.00	: 95.45	:
002 :Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	: 108,864,000.00	: 36,300,648.00	: 15,113,390.00	: 51,414,038.00	: 47.23	:
003 :Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	: 1,138,000,000.00	: 823,902,087.00	: 93,535,938.00	: 917,438,025.00	: 80.62	:
1.3.2: BAGI HASIL BUKAN PAJAK	: 3,720,000,000.00	: 19,233,415.00	: 3,866,670,729.00	: 3,885,904,144.00	: 104.46	:
001 :Iuran Hasil Hutan (IHH)	: 100,000,000.00	: 17,321,587.00	: 118,950,729.00	: 136,172,316.00	: 136.17	:
002 :Iuran Hak Pengusaha Hutan (HPH)	:	:	: 139,845,600.00	: 139,845,600.00	:	:
003 :Pemberian Hak Atas Tanah Negara	: 20,000,000.00	: 1,911,828.00	: 7,974,394.00	: 9,886,222.00	: 49.43	:
005 :Penerimaan dari Iuran Eksploitasi/Royalti	: 3,600,000,000.00	:	: 3,600,000,000.00	: 3,600,000,000.00	: 100.00	:
VII :1.3.3: DANA RUTIN DAERAH	: 22,268,108,500.00	: 16,360,600.00	: 18,179,062,700.00	: 18,195,423,300.00	: 81.71	:
1 : 001 :Dana Belanja Pegawai	: 21,020,380,000.00	:	: 17,245,323,500.00	: 17,245,323,500.00	: 82.04	:
2 : 002 :Dana Belanja Non Pegawai	: 403,003,500.00	:	: 274,691,200.00	: 274,691,200.00	: 68.16	:
3 : 003 :Sumbangan Lainnya dari Pemerintah	: 16,923,000.00	: 3,582,000.00	: 13,764,000.00	: 17,346,600.00	: 102.50	:
4 : 010 :Dana Rutin dari Dati I Irian Jaya	: 827,802,000.00	: 12,778,000.00	: 645,284,000.00	: 658,062,000.00	: 79.50	:
VIII:1.3.4: DANA PEMBANGUNAN DAERAH	: 59,885,325,000.00	: 9,081,058,800.00	: 48,321,644,480.00	: 57,402,703,280.00	: 95.85	:
1 : 001 :Dana Pembangunan Daerah	: 59,435,325,000.00	: 8,906,058,800.00	: 48,141,644,480.00	: 57,047,703,280.00	: 95.98	:
2 : 010 :Dana Pembangunan Dari Dati I	: 450,000,000.00	: 175,000,000.00	: 180,000,000.00	: 355,000,000.00	: 78.89	:
IX :1.5 :URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	: 3,354,653,000.00	:	:	:	:	:
001 :Iuran Wajib Pegawai (IWP)	: 691,523,000.00	:	:	:	:	:
002 :Penerimaan Potongan Beras	: 1,750,000,000.00	:	:	:	:	:
003 :Penerimaan Pajak Penghasilan	: 763,130,000.00	:	:	:	:	:
005 :Potongan tabungan uang muka perumahan pegawai	: 150,900,000.00	:	:	:	:	:
: :REKAPITULASI	:	:	:	:	:	:
I :1.1.1: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	:	:	:	:	:	:
II :1.2.1: Pajak Daerah	: 1,006,000,000.00	: 142,100,748.00	: 1,093,743,793.00	: 1,235,844,541.00	: 122.85	:
III :1.2.2: Retribusi Daerah	: 1,540,000,000.00	: 148,475,245.00	: 1,142,966,799.00	: 1,291,442,044.00	: 83.86	:
IV :1.2.3: Penerimaan Laba Usaha Daerah	: 70,000,000.00	: 104,300,000.00	:	: 104,300,000.00	: 149.00	:
V :1.2.4: Penerimaan Lain-lain	: 35,000,000.00	: 35,454,271.00	: 130,576,837.00	: 166,031,108.00	: 474.37	:
: :1.3.1: Bagi Hasil Pajak	: 4,337,412,030.00	: 875,749,834.00	: 3,042,913,354.00	: 3,918,663,188.00	: 90.35	:
: :1.3.2: Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak	: 3,720,000,000.00	: 19,233,415.00	: 3,866,670,729.00	: 3,885,904,144.00	: 104.46	:
: :1.3.3: Dana Rutin Daerah	: 22,268,108,500.00	: 16,360,600.00	: 18,179,062,700.00	: 18,195,423,300.00	: 81.71	:
: :1.3.4: Dana Pembangunan Daerah	: 59,885,325,000.00	: 9,081,058,800.00	: 48,321,644,480.00	: 57,402,703,280.00	: 95.85	:
: :1.5 :Urusan Kas dan Perhitungan	: 3,354,653,000.00	:	:	:	:	:

	3	4	5	6	7	8
Jumlah	:96.216.498.530.00	:10.422.732.913.00	:75.777.578.692.00	:86.200.311.605.00	:89.59	:
1.1:Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	:	:	:	:	:	:
1.2 :Pendapatan Asli Daerah	: 2.651.000.000.00	: 430.330.264.00	: 2.367.287.429.00	: 2.797.617.693.00	:105.53	:
1.3 :Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah: :atau Instansi yang lebih tinggi	:90.210.845.530.00	: 9.992.402.649.00	:73.410.291.263.00	:83.402.693.912.00	: 92.45	:
1.3 :Penyusutan Kas dan Perhitungan	: 3.354.653.000.00	:	:	:	:	:
Jumlah	:96.216.498.530.00	:10.422.732.913.00	:75.777.578.692.00	:86.200.311.605.00	: 89.59	:

Jayapura, 20 Desember 2000

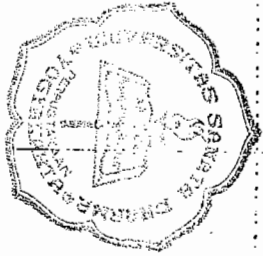
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA JAYAPURA



Urs. WIDARTO
DINAS PENDAPATAN DAERAH
010054655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	SISA LERIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LAMA		399.690.177,00	-	399.690.177,00	399.690.177,00	100,00	-	-	-
11.2	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4.300.000.000,00	737.010.176,00	3.562.989.824,00	4.234.992.563,00	1114,57	-	716.130.227,00	16.673,97
1	11.2.1 PADAI PADANG		1.812.500.000,00	152.190.357,00	1.660.309.643,00	2.037.462.430,00	1111,90	-	716.495.400,00	126,15
1	1001 Pajak Hotel dan Restoran		920.000.000,00	20.842.000,00	899.158.000,00	878.935.742,00	105,57	-	80.036.700,00	89,13
2	1002 Pajak Hiburan		30.000.000,00	2.000.000,00	28.000.000,00	31.115.500,00	111,11	-	7.047.100,00	25,49
3	1003 Pajak Sotilaw		190.000.000,00	7.249.500,00	182.750.500,00	201.238.800,00	110,10	-	61.032.300,00	33,43
4	1004 Pajak Persewaan Jalan Baku		620.000.000,00	28.255.150,00	591.744.850,00	701.609.035,00	118,75	-	71.049.830,00	12,02
5	1005 Pajak Pengambilan dan Penjualan Bahan Galian Golongan C		25.500.000,00	12.595.267,00	12.904.733,00	23.906.940,00	185,20	-	-	-
6	1006 Pajak Pemanfaatan A. B. T. dan Air Permukaan		7.000.000,00	2.359.230,00	4.640.770,00	17.684.580,00	378,67	-	10.684.580,00	229,34
11.2	RETRIBUSI DAERAH		2.177.500.000,00	119.070.275,00	2.058.429.725,00	2.203.036.760,00	107,26	-	257.227.550,00	12,73
1	1001 Retribusi Pelayanan Kesehatan		70.000.000,00	2.975.475,00	67.024.525,00	79.044.850,00	117,92	-	9.044.850,00	13,41
2	1002 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		500.000.000,00	17.900.000,00	482.100.000,00	536.915.480,00	111,36	-	76.915.480,00	15,92
3	1003 Ret. Peng. Biaya Cetak KIP/Alto Catatan Sipil		217.000.000,00	6.402.500,00	223.402.500,00	164.183.000,00	73,45	-	-	-
4	1004 Ret. Pelayanan Pemakaman & Penguburan Mayat		10.000.000,00	2.395.000,00	7.605.000,00	10.110.000,00	133,06	-	110.000,00	1,45
5	1005 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum		250.000.000,00	17.706.700,00	232.293.300,00	257.898.600,00	111,03	-	7.899.600,00	3,36
6	1006 Retribusi Pasar		220.000.000,00	10.713.250,00	209.286.750,00	272.518.180,00	129,97	-	52.518.180,00	25,10
7	1007 Retribusi Air Bersih		-	-	-	-	-	-	-	-
8	1008 Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		-	-	-	-	-	-	-	-
9	1009 Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta		-	-	-	-	-	-	-	-
10	1010 Ret. Pasar Grosir dan atau Pertokoan		-	-	-	-	-	-	-	-
11	1011 Retribusi Terminal		140.000.000,00	1.800.500,00	141.800.500,00	150.926.550,00	106,38	-	10.926.550,00	7,73
12	1012 Retribusi Tempat Khusus Parkir		-	-	-	-	-	-	-	-
13	1013 Retribusi Penyelamatan Kaku		5.000.000,00	-	5.000.000,00	3.350.000,00	67,00	-	-	-
14	1014 Retribusi Rumah Potong Hewan		11.500.000,00	-	11.500.000,00	5.830.000,00	50,70	-	-	-
15	1015 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		-	-	-	-	-	-	-	-
16	1016 Retribusi Penjualan Limbah Cair		3.000.000,00	-	3.000.000,00	900.000,00	30,00	-	-	-
17	1017 Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah		-	-	-	-	-	-	-	-
18	1018 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan		150.000.000,00	27.011.350,00	122.988.650,00	203.466.400,00	165,44	-	52.446.600,00	42,63
19	1019 Retribusi Ijin Tembak Penjualan Beralkohol		20.000.000,00	-	20.000.000,00	11.500.000,00	57,50	-	-	-
20	1020 Retribusi Ijin Sarungpaku		450.000.000,00	16.940.400,00	433.059.600,00	505.518.700,00	116,74	-	55.010.700,00	12,71
21	1021 Retribusi Ijin Travel		130.000.000,00	8.451.000,00	121.549.000,00	140.928.000,00	115,93	-	30.979.000,00	25,46
11.3	PENDIRITAWI LABA USAHA DAERAH		75.000.000,00	-	75.000.000,00	91.350.000,00	121,80	-	16.350.000,00	21,80
1	1001 Bank Pembiayaan Daerah		75.000.000,00	-	75.000.000,00	91.350.000,00	121,80	-	16.350.000,00	21,80
2	1002 Pembiayaan Daerah Air Minum		-	-	-	-	-	-	-	-
IV	11.2 PENDIRITAWI LAIN-LAIN		235.000.000,00	55.768.874,00	179.231.126,00	463.014.775,00	258,33	-	278.014.775,00	155,20
1	1001 Hasil Penjualan Barang Milik Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-
2	1002 Jasa Gizi		120.000.000,00	32.455.876,00	87.544.124,00	306.492.457,00	350,00	-	186.492.457,00	213,16
3	1003 Gumbangan Pihak ke Tiga		-	-	-	-	-	-	-	-
4	1004 Perawatan Ganti Bumi atau Kekayaan Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-
5	1005 Retoran Kelebihan Pemb. Kepada Pihak ke Tiga		-	-	-	-	-	-	-	-
6	1006 Anggaran dan Cicilan Kendaraan Bermotor		-	-	-	-	-	-	-	-
7	1007 Penarikan Serba-serbi		115.000.000,00	23.312.998,00	91.687.002,00	156.522.318,00	170,86	-	41.522.318,00	45,44

1	1001 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.711.000.000,00	3.949.200.000,00	7.660.200.000,00	3.094.267.762,00	111,77	
2	1002 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	473.000.000,00	473.770.000,00	946.770.000,00	1.476.956.674,00	171,94	
3	1003 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.400.000.000,00	-	1.400.000.000,00	1.400.779.651,00	114,34	
4	1004 Pajak Penghasilan, Grupa Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah	2.000.000.000,00	2.501.000.000,00	4.501.000.000,00	6.091.403.174,00	177,57	
5	1005 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	11.000.000.000,00	11.500.000.000,00	22.500.000.000,00	16.777.277.180,00	117,23	
6	1006 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Pajak Penghasilan	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
7	1007 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Pajak Pertambahan Nilai	10.000.000.000,00	11.500.000.000,00	21.500.000.000,00	15.776.277,180,00	117,23	
8	1008 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Pajak Pertambahan Nilai	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
9	1009 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Pajak Pertambahan Nilai	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
10	1010 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Pajak Pertambahan Nilai	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
11	1101 ALokasi Umum	114.124.657.750,00	-	114.124.657.750,00	114.124.657.750,00	100,00	
12	11.1 Dana Alokasi Umum	114.124.657.750,00	-	114.124.657.750,00	114.124.657.750,00	100,00	
13	1111.1 Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-	
14	11.2 Dana Alokasi Khusus	500.000.000,00	-	500.000.000,00	506.804.500,00	101,36	6.804.500,00
15	11.3 Dana Alokasi Khusus	500.000.000,00	-	500.000.000,00	506.804.500,00	101,36	6.804.500,00
16	11.4 Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	
17	11.4 Pinjaman dari Bank	500.000.000,00	-	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	6.804.500,00
18	11.4 Pinjaman dari Sektor Lain-lain	-	-	-	-	-	
19	11.5 Pinjaman Lain-lain Pemerintah Yang Sama	200.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	696.123.400,00	174,03	296.123.400,00
20	11.5 Pinjaman dari Propinsi	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	698.123.400,00	34,90	696.123.400,00
21	1001 Pinjaman dari Propinsi	10.000.000,00	-	10.000.000,00	9.123.400,00	91,23	876.600,00
22	1002 Pinjaman dari Propinsi	10.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	690.000.000,00	627,27	580.000,00
23	11.6 Pinjaman Lain-lain Pemerintah Yang Berbeda	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.024.660.215,00	101,23	24.660.215,00
24	11.7 Pinjaman Lain-lain Pemerintah Yang Berbeda	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.281.874.210,00	114,09	281.874.210,00
25	1001 Pinjaman Lain-lain Pemerintah Yang Berbeda	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	3.400.000.000,00	2.482.733.361,00	119,78	772.733.361,00
26	1002 Pinjaman Lain-lain Pemerintah Yang Berbeda	300.000.000,00	300.000.000,00	600.000.000,00	2.177.094.195,00	361,67	1.577.094.195,00
27	1003 Pinjaman Lain-lain Pemerintah Yang Berbeda	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	1.412.660.393,00	141,26	412.660.393,00
28	1004 Pinjaman Lain-lain Pemerintah Yang Berbeda	200.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	199.426.770,00	99,71	573.230,00
29	11.8 Pinjaman Lain-lain Pemerintah Yang Berbeda	1.000.000.000,00	1.753.045.000,00	2.753.045.000,00	1.753.045.000,00	100,00	753.045.000,00
30	1001 Dana Hibah	1.000.000.000,00	1.753.045.000,00	2.753.045.000,00	1.753.045.000,00	100,00	753.045.000,00



REKAPITULASI										
I	1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	399.690.177.00	-	399.690.177.00	399.690.177.00	100.00	-	-	-
II	1.2	Pajak Daerah	1.812.500.000.00	162.192.957.00	1.865.269.471.00	2.027.462.428.00	111.86	-	214.962.428.00	-
III	1.2	Retribusi Daerah	2.177.500.000.00	119.077.275.00	2.224.023.485.00	2.343.096.760.00	107.60	-	165.596.760.00	-
IV	1.2	Penerimaan Lada Usaha Daerah	75.000.000.00	-	75.000.000.00	91.350.000.00	121.88	-	16.350.000.00	-
V	1.2	Penerimaan lain-lain	235.000.000.00	55.368.574.00	407.245.901.00	51.014.775.00	127.03	-	220.014.775.00	-
VI	1.3	Sisa Hasil Pajak	7.025.263.000.00	4.926.493.504.00	6.534.738.839.00	11.461.037.643.00	163.14	-	4.435.949.643.00	-
VI	1.3	Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak	11.105.597.000.00	4.426.100.440.00	4.049.950.372.00	6.540.050.812.00	76.68	2.504.545.258.00	-	-
VIII	1.3	Dana Alokasi Umum	114.124.657.750.00	-	114.124.658.000.00	114.124.658.000.00	100.00	-	-	-
IX	1.3	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-
X	1.4	Pinjaman Daerah	500.000.000.00	-	505.864.500.00	505.864.500.00	101.38	-	6.864.500.00	-
XI	1.5	Bagian Penerimaan Lain-lain yang sah	206.262.000.00	500.000.000.00	198.123.400.00	898.123.400.00	338.46	-	491.861.400.00	-
XII	1.6	Urusan Kas dan Perhitungan	6.824.638.000.00	3.426.548.426.00	4.605.921.293.00	8.024.859.719.00	91.05	709.768.281.00	-	-
Jumlah			146.483.132.995.00	13.678.562.776.00	125.007.855.436.00	146.860.438.214.00	101.50	3.259.314.537.00	5.559.619.506.00	2.200.304.00
I	1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	399.690.177.00	-	399.690.177.00	399.690.177.00	100.00	-	-	-
I	1.2	Pendapatan Asli Daerah	4.300.000.000.00	337.035.105.00	4.587.856.857.00	4.924.922.963.00	114.53	-	624.922.963.00	-
I	1.3	Dana Perimbangan	132.255.542.818.00	9.412.599.244.00	124.709.347.211.00	134.121.946.455.00	101.41	2.589.546.256.00	4.435.949.643.00	-
I	1.4	Pinjaman Daerah	500.000.000.00	-	505.864.500.00	505.864.500.00	101.38	-	6.864.500.00	-
I	1.5	Lain-lain Penerimaan yang sah	206.262.000.00	500.000.000.00	198.123.400.00	898.123.400.00	338.46	-	491.861.400.00	-
I	1.6	Urusan Kas dan Perhitungan	6.824.638.000.00	3.426.548.426.00	4.605.921.293.00	8.024.859.719.00	91.05	709.768.281.00	-	-
Jumlah			146.483.132.995.00	13.678.562.776.00	125.007.855.436.00	146.860.438.214.00	101.50	3.259.314.537.00	5.559.619.506.00	2.200.304.00

JAYAPURA, 27 FEBRUARI 2002



DAFTAR : TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
KOTA JAYAPURA
BULAN : DESEMBER 2002

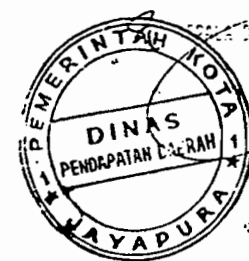
No. Urut	Kode	Uraian	TARGET Rp.	PENERIMAAN BULAN INI	PENERIMAAN S/D BULAN LALU	PENERIMAAN S/D BULAN INI	REalisasi			
							%	LODIP	KURANG	KEPERCAYAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.1	GDP PERHITUNGAN TAKUT LALU	3,500,000,000.00	-	-	3,500,000,000.00	100.00	-	-	-
	1.2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9,001,535,000.00	372,025,189.00	10,419,731,362.00	16,001,400,150.00	111.01	11,089,374,457.00	199,087,500.00	1,090,007,150.00
I	1.0.1	PAJAK DAERAH	3,240,000,000.00	50,313,064.00	3,409,100,866.00	3,479,145,130.00	107.36	329,145,130.00	-	259,145,130.00
1	004	Pajak Hotel dan Restoran	1,550,000,000.00	35,845,060.00	1,518,396,174.00	1,552,441,194.00	100.16	2,441,194.00	-	-
2	005	Pajak Hiburan	115,000,000.00	1,059,300.00	121,059,750.00	122,117,050.00	115.74	17,717,050.00	-	-
3	006	Pajak Reklame	250,000,000.00	5,107,000.00	279,221,630.00	289,229,630.00	113.34	23,229,630.00	-	-
4	007	Pajak Penerangan Jalan Umum	1,700,000,000.00	7,795,934.00	1,476,376,244.00	1,494,170,140.00	114.17	184,172,140.00	-	-
5	008	Pajak Pengambilan & Pengalangan Bahan Gali	75,000,000.00	-	21,876,100.00	21,876,100.00	107.51	1,876,100.00	-	-
II	1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	5,760,000,000.00	262,117,536.00	5,740,424,555.00	6,000,540,000.00	104.77	492,029,555.00	199,287,500.00	270,840,000.00
1	001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	100,000,000.00	9,642,000.00	125,290,320.00	131,940,320.00	170.94	31,940,320.00	-	-
2	002	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	800,000,000.00	7,837,260.00	819,320,700.00	828,124,560.00	103.52	26,124,560.00	-	-
3	003	Ret.Peng.Biaya Cetak KTP & Akta Catatan Sipil	434,260,000.00	-	483,150,000.00	487,150,000.00	113.05	59,150,000.00	-	-
4	004	Ret. Pelayanan Pemakaman & Pengalangan Mayat	16,200,000.00	2,013,000.00	9,849,000.00	11,050,000.00	118.50	1,200,000.00	-	-
5	005	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	275,000,000.00	35,062,300.00	243,939,050.00	279,840,350.00	101.76	4,840,350.00	-	-
6	006	Retribusi Pasar	230,000,000.00	15,556,950.00	215,124,525.00	230,681,475.00	100.30	681,475.00	-	-
7	014	Retribusi Terminal	150,000,000.00	4,533,100.00	150,172,400.00	194,705,500.00	129.69	34,705,500.00	-	-
8	018	Retribusi Pengedatan Pakus	6,000,000.00	500,000.00	5,709,000.00	6,200,000.00	103.33	200,000.00	-	-
9	019	Retribusi Rumah Potong Hewan	10,500,000.00	315,000.00	4,885,000.00	5,800,000.00	55.24	-	4,700,000.00	-
10	021	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	50,000,000.00	-	6,660,000.00	6,660,000.00	13.32	-	43,340,000.00	-
11	026	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	300,000,000.00	94,628,000.00	417,956,100.00	512,584,100.00	170.86	212,584,100.00	-	-
12	027	Retribusi Ijin Tempat Penjualan Beralkohol	490,000,000.00	45,000,000.00	446,750,000.00	491,750,000.00	100.36	1,750,000.00	-	-
13	028	Retribusi Ijin Gangguan	525,000,000.00	19,148,920.00	506,221,194.00	525,370,114.00	100.07	370,114.00	-	-
14	029	Retribusi Ijin Trayek	170,000,000.00	6,679,000.00	200,182,600.00	206,861,600.00	121.68	36,861,600.00	-	-
15	031	Retribusi Ijin Usaha Pariwisata	177,500,000.00	-	100,700,000.00	100,700,000.00	56.73	-	76,800,000.00	-
16	032	Ret.Ijin Praktek Pel.Kesehatan & Farmasi	75,000,000.00	7,005,000.00	3,547,500.00	10,552,500.00	14.07	-	64,447,500.00	-
17	033	Ret. Tata Cara Pemasukan Minuman Beralkohol	1,760,000,000.00	-	1,760,000,000.00	1,760,000,000.00	100.00	-	-	-
18	034	Ret. Pedagang Usaha Industri & Perdagangan	156,000,000.00	11,800,000.00	201,931,559.00	213,731,559.00	137.01	57,731,559.00	-	-
19	035	Retribusi Raki Lima	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	1.2.3	PENERIMAAN LABA TERAKSI BAIK	100,000,000.00	-	269,381,840.00	269,381,840.00	269.38	100,000,000.00	-	269,381,840.00
1	001	Bank Pembangunan Daerah	100,000,000.00	-	269,381,840.00	269,381,840.00	269.38	100,000,000.00	-	269,381,840.00
74	1.2.4	PENERIMAAN LAIN-LAIN	570,535,000.00	11,751,394.00	1,100,001,699.00	1,241,353,093.00	149.13	400,010,000.00	-	409,018,053.00
1	002	Jasa Giro	640,000,000.00	17,107,301.00	974,034,410.00	1,200,328,573.00	156.61	360,328,573.00	-	-
2	007	Penerimaan Serba-Serbi	150,535,000.00	10,007,433.00	205,967,209.00	200,024,520.00	124.25	40,681,520.00	-	-
	1.3	DANA PERINDAHAN	150,000,000,000.00	7,355,000,545.00	150,140,007,514.00	149,000,516,050.00	100.55	10,000,000,000.00	1,464,000,000.00	700,000,000.00
V	1.3.1	BAGI HASIL PAJAK	15,357,840,000.00	1,491,117,141.00	14,627,627,514.00	17,100,741,555.00	111.50	10,000,000,000.00	750,000,000.00	-
1	001	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4,675,930,000.00	1,010,340,154.00	5,000,740,507.00	6,223,923,051.00	124.50	1,000,000,000.00	-	-
2	002	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1,200,000,000.00	371,544,000.00	1,214,740,165.00	1,404,057,164.00	112.57	1,000,000,000.00	-	-
3	003	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1,000,000,000.00	420,584,100.00	170,460,000.00	100,174,441.00	11.06	-	300,000,000.00	-
4	004	Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan PPN Pasal 21	4,960,000,000.00	7,107,417,500.00	5,001,500,500.00	7,355,000,000.00	105.41	374,000,000.00	-	-
5	005	Bagian PBB dan SPPK dari Propinsi Papua	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	-	1,350,000,000.00	100.00	-	-	-
VI	1.3.2	BAGI HASIL BUMBU BAYAR	9,550,476,000.00	7,459,991,404.00	6,234,600,000.00	6,600,771,404.00	91.03	710,000,000.00	1,074,000,146.00	-
1	002	Iuran Hak Pengusaha Mutan (HPM)	2,231,720,000.00	352,349,050.00	1,000,276,000.00	1,354,625,100.00	60.70	-	977,100,000.00	-
2	003	Pemberian Hak Atas Tanah Negara	30,000,000.00	-	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	1,000,000.00	-	-
3	005	Penerimaan dari Iuran Eksploitasi/Royalti	5,250,000,000.00	1,997,420,000.00	4,054,717,400.00	5,150,107,000.00	96.62	-	197,000,000.00	-
4	006	Bag. Daerah dr. SDA Sektor Pertambangan Migas	640,000,000.00	390,570,000.00	330,107,500.00	700,759,500.00	112.62	80,000,000.00	-	-
5	007	Bag. Daerah dr. SDA Sektor Perikanan	660,000,000.00	-	795,285,000.00	795,285,000.00	120.50	100,000,000.00	-	-
6	010	Ret. Galian C dan BBT dari Provinsi	110,750,000.00	110,750,000.00	-	110,750,000.00	100.00	-	-	-
VII	1.3.3	DANA ALOKASI UMUM	141,000,000,000.00	-	141,000,000,000.00	141,000,000,000.00	100.00	-	-	-
1	001	Dana Alokasi Umum	141,000,000,000.00	-	141,000,000,000.00	141,000,000,000.00	100.00	-	-	-
VIII	1.3.4	DANA ALOKASI KHUSUS	-	639,539,000.00	-	639,539,000.00	-	-	-	-
1	001	Dana Alokasi Khusus	-	639,539,000.00	-	639,539,000.00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.4	PINJAMAN GAIRAH	-	-	-	-	-	-	-
	1.4.1	PINJAMAN SALAH KESEKUT	-	-	-	-	-	-	-
1	001	Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-
2	002	Pinjaman dari Bank	-	-	-	-	-	-	-
3	003	Pinjaman dari Sumber Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	1.5.1	BAGIAN LAIN - 1.5.1	43,390,485,000.00	7,038,597,800.00	35,993,937,300.00	47,229,455,500.00	100.00	-	-
1	001	Penerimaan Dana Perimbangan	4,227,933,000.00	742,000,000.00	3,484,930,000.00	4,227,933,000.00	100.00	-	-
	1.5.2	PEMERINTAH DARI PROPINSI	39,162,552,000.00	6,296,594,800.00	32,534,957,200.00	39,162,552,000.00	100.00	-	-
1	001	Penerimaan Bagian PBB Propri untuk Pemerintah Desa	-	-	-	-	-	-	-
2	002	Bantuan Pembangunan dari Propinsi Papua	39,162,552,000.00	6,296,594,800.00	32,534,957,200.00	39,162,552,000.00	100.00	-	-
	1.6	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	11,517,580,000.00	1,187,055,037.00	11,124,159,355.00	12,274,218,150.00	106.59	254,857,193.00	94,202,001.00
	1.6.1	R U T I N	11,517,580,000.00	1,187,055,037.00	11,124,159,355.00	12,274,218,150.00	106.59	254,857,193.00	94,202,001.00
1	001	Insan Wajib Pegawai (IWP)	4,266,000,000.00	372,327,519.00	4,050,509,914.00	3,722,607,400.00	117.74	755,857,400.00	-
2	002	Penerimaan Potongan Beras	3,104,000,000.00	320,599,240.00	2,998,760,500.00	3,091,999,700.00	103.14	93,560,760.00	-
3	003	Penerimaan Pajak Penghasilan	2,350,000,000.00	451,127,078.00	2,714,927,500.00	2,767,104,500.00	97.89	-	52,935,461.00
4	004	Penerimaan Asas Rakti Yorpri	-	-	-	-	-	-	-
5	005	Potongan Tabungan Uang Muka Perum. Pegawai	297,580,000.00	16,302,000.00	257,911,400.00	294,207,400.00	95.51	-	13,366,600.00
	1.6.2	PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-
	001	Dana Reboisasi	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULASI									
I	1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	-	3.500.000.000,00
			3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	-	3.500.000.000,00
			5.799.000.000,00	5.799.000.000,00	5.799.000.000,00	5.799.000.000,00	5.799.000.000,00	199.287.500,00	5.998.287.500,00
IV	1.2.3	Penerimaan Usaha Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00
V	1.2.4	Penerimaan Lain - Lain	922.535.000,00	922.535.000,00	922.535.000,00	922.535.000,00	922.535.000,00	399.365.560,00	1.321.899.560,00
VI	1.3.1	Bagi Hasil Pajak	15.357.642.000,00	15.357.642.000,00	15.357.642.000,00	15.357.642.000,00	15.357.642.000,00	-	15.357.642.000,00
VII	1.3.2	Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak	9.559.476.000,00	9.559.476.000,00	9.559.476.000,00	9.559.476.000,00	9.559.476.000,00	1.074.663.146,00	10.634.142.146,00
VIII	1.3.3	Dana Alokasi Umum	141.280.000,00	141.280.000,00	141.280.000,00	141.280.000,00	141.280.000,00	-	141.280.000,00
XI	1.3.4	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
X	1.4	Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
XI	1.5	Lain - Lain Penerimaan Yang Sah	43.288.485.000,00	43.288.485.000,00	43.288.485.000,00	43.288.485.000,00	43.288.485.000,00	-	43.288.485.000,00
VII	1.6	Urusan Khaz dan Perhitungan	11.517.580.000,00	11.517.580.000,00	11.517.580.000,00	11.517.580.000,00	11.517.580.000,00	31.000.000,00	11.828.580.000,00
Jumlah			1034.395.710.000,00	1034.395.710.000,00	1034.395.710.000,00	1034.395.710.000,00	1034.395.710.000,00	1.799.818.007,00	1.234.195.718.000,00
	1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	-	3.500.000.000,00
	1.2	Pendapatan Asli Daerah	2.931.525.000,00	2.931.525.000,00	2.931.525.000,00	2.931.525.000,00	2.931.525.000,00	199.287.500,00	3.130.812.500,00
	1.3	Dana Perimbangan	146.189.118.000,00	146.189.118.000,00	146.189.118.000,00	146.189.118.000,00	146.189.118.000,00	1.464.328.706,00	160.843.826,00
	1.4	Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	1.5	Lain - Lain Penerimaan yang Sah	43.288.485.000,00	43.288.485.000,00	43.288.485.000,00	43.288.485.000,00	43.288.485.000,00	-	43.288.485.000,00
	1.6	Urusan Khaz dan Perhitungan	11.517.580.000,00	11.517.580.000,00	11.517.580.000,00	11.517.580.000,00	11.517.580.000,00	31.000.000,00	11.828.580.000,00
Jumlah			1034.395.710.000,00	1034.395.710.000,00	1034.395.710.000,00	1034.395.710.000,00	1034.395.710.000,00	1.799.818.007,00	1.234.195.718.000,00

Jayapura, 01 Januari 2022



KEPALA BIDANG PENDAPATAN DAERAH
KOTA JAYAPURA
S. S. WIDAPTE
PEMBINA T.M. I
419. 010054655

BULAN : DESEMBER 2003

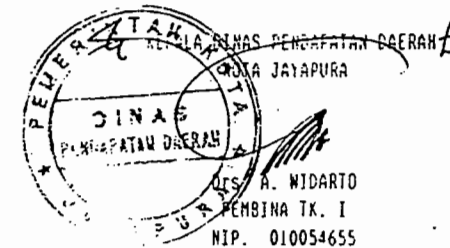
No. Urut	POS/AYAT	U R A I A N	TARGET Rp.	PENERIMAAN BULAN INI	PENERIMAAN S/D BULAN LALU	PENERIMAAN S/D BULAN INI	S I S A		KETERANGAN	
							LEBIH	KURANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SISA PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU	3,526,693,000.00	3,526,693,000.00		3,526,693,000.00	100.00	-	-	
	1.2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	13,560,000,000.00	1,458,837,972.00	13,164,719,911.20	14,623,557,883.20	106.32	1,549,457,364.28	725,879,591.08	1,123,557,883.20
I	1.2.1	PAJAK DAERAH	4,883,800,000.00	725,372,571.00	5,196,600,000.00	5,922,007,802.60	121.26	1,038,267,802.60	-	1,939,267,802.60
1	004	Pajak Hotel	760,000,000.00	23,589,498.00	1,130,489,375.60	1,154,078,873.60	120.22	154,078,873.60	-	
2	005	Pajak Hiburan	176,000,000.00	9,596,750.00	207,344,799.00	216,943,549.00	123.26	40,943,549.00	-	
3	006	Pajak Reklame	325,000,000.00	17,548,250.00	310,498,500.00	328,046,750.00	100.94	3,046,750.00	-	
4	007	Pajak Penerangan Jalan	2,000,000,000.00	589,875,625.00	2,193,552,876.00	2,783,428,503.00	139.17	753,428,503.00	-	
5	008	Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Gal. Gol C	27,000,000.00	-	25,400,908.00	28,400,908.00	105.19	1,400,908.00	-	
6	009	Pajak Restoran	1,305,000,000.00	84,760,448.00	1,234,992,030.00	1,319,752,478.00	101.13	14,752,478.00	-	
7	019	Tunggakan Pajak	66,000,000.00	-	66,580,318.00	66,580,318.00	100.83	580,318.00	-	
8	020	Denda Pajak	24,800,000.00	-	24,836,423.00	24,836,423.00	100.15	36,423.00	-	
II	1.2.2	RETRIBUSI DAERAH	7,086,200,000.00	642,480,674.00	6,648,525,049.00	7,291,005,723.00	102.89	492,724,973.00	287,919,250.00	294,605,723.00
1	001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	120,000,000.00	14,790,735.00	123,979,957.00	138,770,692.00	115.64	18,770,692.00	-	
2	002	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	880,000,000.00	29,150,500.00	920,061,450.00	949,211,950.00	107.86	69,211,950.00	-	
3	003	Ret. Pengg. Biaya Cetak KTP & Akte Catatan Sipil	380,000,000.00	32,835,000.00	272,832,000.00	305,667,000.00	80.44	-	74,335,000.00	
4	004	Ret. Pelayanan Pemakaman & Penguburan mayat	10,000,000.00	1,575,000.00	11,426,950.00	13,001,950.00	130.92	3,601,950.00	-	
5	005	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Ulu	200,000,000.00	500,000.00	208,104,100.00	208,604,100.00	104.30	8,604,100.00	-	
6	006	Retribusi Pasar	400,000,000.00	30,479,500.00	295,635,775.00	326,115,275.00	81.53	-	73,884,725.00	
7	009	Retribusi Pemeriksaan Aiat Peradam Kebakaran	4,000,000.00	-	2,970,000.00	2,970,000.00	74.25	-	1,930,000.00	
8	014	Retribusi Terminal	176,000,000.00	22,736,800.00	155,024,470.00	177,761,270.00	101.00	1,761,270.00	-	
9	015	Retribusi Tempat Khusus Parkir	750,000,000.00	34,780,375.00	723,545,625.00	758,326,000.00	101.11	8,326,000.00	-	
10	018	Retribusi Penyedotan Kaku	6,000,000.00	600,000.00	6,475,000.00	7,275,000.00	121.25	1,275,000.00	-	
11	019	Retribusi Rumah Potong Hewan	10,000,000.00	2,385,000.00	14,070,000.00	16,455,000.00	164.55	6,455,000.00	-	
12	021	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	10,000,000.00	3,700,000.00	6,300,000.00	10,000,000.00	100.00	-	-	
13	026	Retribusi Ijin mendirikan Bangunan	696,000,000.00	83,679,000.00	747,499,000.00	831,178,000.00	119.42	135,178,000.00	-	
14	027	Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	322,000,000.00	29,000,000.00	372,050,000.00	401,050,000.00	124.55	79,050,000.00	-	
15	028	Retribusi Ijin Gangguan	625,000,000.00	19,227,500.00	606,693,000.00	625,920,500.00	100.15	920,500.00	-	
16	029	Ret. Ijin Trayek	245,000,000.00	10,777,000.00	338,052,500.00	348,829,500.00	142.38	103,829,500.00	-	
17	031	Retribusi Ijin Usaha Pariwisata	120,000,000.00	4,950,000.00	91,050,000.00	96,000,000.00	80.00	-	24,000,000.00	
18	032	Ret. Ijin Praktek Pelayanan Kesehatan & Farmasi	75,000,000.00	-	28,853,475.00	28,853,475.00	38.47	-	46,146,525.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
20	033	Ret. Tata Cara Pemasukan Minuman Beralkohol	1,760,000,000.00	293,333,300.00	1,466,666,700.00	1,760,000,000.00	100.00	-	0.00	
21	034	Ret. Ijin Usaha Industri & Perdagangan	210,000,000.00	12,450,000.00	137,025,000.00	149,475,000.00	69.57	-	62,525,000.00	
22	035	Retribusi Pedagang Kaki Lina	10,000,000.00	1,612,000.00	24,890,000.00	26,502,000.00	265.02	16,502,000.00	-	
23	036	Retribusi Hasil Mutan	64,200,000.00	13,918,964.00	89,312,547.00	103,231,511.00	160.80	39,031,511.00	-	
24	040	Tunggakan Retribusi	5,000,000.00	-	5,807,500.00	5,807,500.00	116.15	607,500.00	-	
III	1.2.3	PENERIMAAN LABA USAHA DAERAH	200,000,000.00	-	341,040,000.00	341,040,000.00	170.52	141,040,000.00	-	141,040,000.00
1	001	Bank Pembangunan Daerah	200,000,000.00	-	341,040,000.00	341,040,000.00	170.52	141,040,000.00	-	141,040,000.00
IV	1.2.4	PENERIMAAN LAIN-LAIN	1,530,000,000.00	90,964,727.00	978,459,630.00	1,069,444,357.00	60.41	177,404,608.00	457,960,251.00	260,555,642.40
1	001	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	0.00	-	-	-	-	-	-	-
2	002	Jasa Giro	1,000,000,000.00	25,834,119.00	536,205,629.92	562,039,748.92	56.20	-	437,960,251.00	
3	007	Penerimaan Serba-Serbi	330,000,000.00	65,150,608.00	442,254,000.08	507,404,608.08	153.76	177,404,608.08	-	
	1.3	DANA PERIMBANGAN	193,821,681,300.00	21,225,538,972.00	172,596,142,328.00	209,904,605,228.00	103.65	9,173,731,595.00	2,090,807,668.00	6,771,721,495.00
V	1.3.1	BAGI HASIL PAJAK	21,376,200,000.00	11,104,035,077.00	13,109,714,564.00	24,213,749,641.00	113.27	3,665,090,141.00	827,540,500.00	2,837,549,641.00
1	001	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6,500,000,000.00	3,428,562,489.00	5,277,214,316.00	8,705,776,805.00	133.54	2,205,776,805.00	-	
2	002	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	900,000,000.00	401,395,188.00	1,030,936,148.00	1,432,332,336.00	159.15	532,332,336.00	-	
3	003	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1,767,200,000.00	1,745,822,000.00	205,519,000.00	2,451,341,000.00	139.71	684,141,000.00	-	
4	004	Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan PPH Pasal 21	9,253,000,000.00	3,798,574,400.00	4,626,865,100.00	8,425,459,500.00	91.06	-	827,540,500.00	
5	005	Bagian PKR dan PPN2 dari Propinsi Papua	2,956,000,000.00	1,729,560,900.00	1,469,180,000.00	3,198,840,900.00	108.22	242,840,000.00	-	
VI	1.3.2	BAGI HASIL BUKAN PAJAK	6,943,084,000.00	5,128,854,171.00	5,143,401,633.00	10,877,255,854.00	156.66	5,197,439,022.00	1,263,267,168.00	3,934,171,854.00
1	002	Provisi Sumber Daya Mutan (FSDH)	1,968,832,000.00	-	1,629,552,200.00	1,628,552,200.00	82.72	-	340,279,500.00	
2	003	Pemberian Hak atas Tanah Negara	58,194,000.00	-	-	-	-	-	58,194,000.00	
3	005	Penerimaan Royalti Pertambangan	3,271,107,000.00	-	3,135,089,876.00	3,135,089,876.00	95.84	-	136,017,124.00	
4	006	Bag. Daerah dari SDA Sektor Pertambangan Migas	487,988,000.00	4,980,649,828.00	704,777,194.00	5,685,427,022.00	1,165.08	5,197,439,022.00	-	
5	007	Bag. Daerah dari SDA Sektor Perikanan	956,963,000.00	148,204,343.00	190,919,913.00	339,124,256.00	35.44	-	617,838,744.00	
6	010	Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	200,000,000.00	-	89,062,500.00	89,062,500.00	44.53	-	110,937,500.00	
VII	1.3.3	DANA ALOKASI UMUM	160,070,000,000.00	-	160,070,000,000.00	160,070,000,000.00	100.00	-	-	-
1	001	Dana Alokasi Umum	160,070,000,000.00	-	160,070,000,000.00	160,070,000,000.00	100.00	-	-	-

DAFTAR DANA ALOKASI KHUSUS		5,432,397,300.00	4,993,649,724.00	749,950,009.00	5,743,599,742.00	105.73	311,202,442.00	-	
1	001 Dana Alokasi Khusus	5,432,397,300.00	4,993,649,724.00	749,950,009.00	5,743,599,742.00	105.73	311,202,442.00	-	
IX 1.4.1 PINJAMAN DALAM NEGERI		0.00	-	-	-	-	-	-	
1	001 Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0.00							
2	002 Pinjaman dari Bank	0.00							
3	003 Pinjaman dari Sumber lainnya								
1.5.0 BAGIAN LAIN - LAIN YANG SAH		52,392,196,400.00	39,063,667,748.00	8,576,646,543.00	47,640,314,291.00	90.93	1,718,000.00	4,269,862,109.00	
1.5.1 PENERIMAAN DARI PEMERINTAH		17,040,000,000.00	9,289,360,808.00	3,480,837,083.00	12,770,137,891.00	74.94	-	4,269,862,109.00	
	001 Penerimaan lain-lain dari Pusat (Dana Penyeimbang	9,540,000,000.00	3,450,636,760.00	3,480,837,083.00	6,961,473,843.00	72.97	-	2,578,526,157.00	
	002 Penerimaan Dari Pemerintah Pusat	7,500,000,000.00	5,808,664,048.00	-	5,808,664,048.00			1,691,335,952.00	
1.5.2 PENERIMAAN DARI PROVINSI		35,368,458,400.00	29,774,366,940.00	5,095,809,460.00	34,870,176,400.00	98.59	1,718,000.00	-	
1	001 Penerimaan Bagian PBB Propinsi untuk Pemerintah Desa	16,262,000.00	-	17,920,000.00	17,920,000.00	110.56	1,718,000.00	-	
2	002 Bantuan Pembangunan Dana Otsus (Fresh Money) Papua	15,000,000,000.00	9,922,170,540.00	5,077,829,460.00	15,000,000,000.00	100.00	-	-	
3	003 Bantuan Program Pembangunan dari Propinsi Papua	18,852,190,400.00	18,852,190,400.00	-	18,852,190,400.00	100.00	-	-	
4	004 Bantuan Pembangunan dari Propinsi Papua	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	66.67	-	-	
1.6 URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN		11,677,044,000.00	13,102,984,742.00	-	13,102,984,742.00	112.21	1,425,940,742.00	-	1,425,940,742.00
1.6.1 R U T I N		11,677,044,000.00	13,102,984,742.00	-	13,102,984,742.00	112.21	1,425,940,742.00	-	1,425,940,742.00
1	001 Iuran Wajib Pegawai (IMP)	4,496,122,000.00	5,473,539,154.00	-	5,473,539,154.00	121.74	977,417,154.00	-	
2	002 Penerimaan Potongan Beras	3,646,434,000.00	3,753,642,970.00	-	3,753,642,970.00	102.94	107,208,970.00	-	
3	003 Penerimaan Pajak Penghasilan	3,287,067,000.00	3,289,049,191.00	-	3,289,049,191.00	102.56	82,042,191.00	-	
4	004 Penerimaan Asal Bakti Korpri	0.00	-	-	-	-	-	-	
5	005 Potongan Tabungan Uang Muka Perum. Pegawai	327,481,000.00	586,753,427.00	-	586,753,427.00	179.17	259,272,427.00	-	
1.6.2 PEMBANGUNAN		-	-	-	-	-	-	-	
001 Dana Reboisasi		-	-	-	-	-	-	-	

REKAPITULASI									
							9,173,731,605.00		
I	1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	8,526,693,000.00	8,526,693,000.00	0.00	8,526,693,000.00	100.00	-	-
II	1.2.1	Pajak Daerah	4,803,800,000.00	725,372,571.00	5,196,695,231.60	5,922,067,892.60	121.26	1,038,267,892.60	1,038,267,892.60
III	1.2.2	Retribusi Daerah	7,086,200,000.00	642,480,674.00	6,648,525,049.00	7,291,005,728.00	102.89	492,724,975.00	237,919,250.00
IV	1.2.3	Penerimaan Laba Usaha Daerah	200,000,000.00	-	341,040,000.00	341,040,000.00	170.52	141,040,000.00	141,040,000.00
V	1.2.4	Penerimaan Lain - Lain	1,339,000,000.00	90,984,727.00	978,459,630.60	1,069,444,357.60	80.41	177,404,668.68	437,960,251.08
VI	1.3.1	Bagi Hasil Pajak	21,376,200,000.00	11,104,035,077.00	13,109,714,564.00	24,213,749,641.00	113.27	3,665,090,141.00	827,540,500.00
VII	1.3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	6,943,084,000.00	5,128,854,171.00	5,748,401,683.00	10,877,255,854.00	156.66	5,197,439,022.00	1,263,267,168.00
VIII	1.3.3	Dana Alokasi Umum	160,070,000,000.00	-	160,070,000,000.00	160,070,000,000.00	100.00	-	-
IX	1.3.4	Dana Alokasi Khusus	5,432,397,300.00	4,993,649,724.00	749,950,009.00	5,743,599,733.00	105.73	311,202,442.00	-
X	1.4.1	Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
XI	1.5	Lain - Lain Penerimaan yang Sah	52,392,196,400.00	39,063,667,748.00	8,576,646,543.00	47,640,314,291.00	90.93	1,718,000.00	4,269,952,109.00
XII	1.6	Urusan Kas dan Perhitungan	11,677,044,000.00	13,192,984,742.00	-	13,192,984,742.00	112.91	1,425,940,742.00	-
J U M L A H			279,917,614,700.00	83,378,722,434.00	201,419,432,710.20	284,798,155,144.20	101.74	12,450,827,722.28	7,086,549,278.08
1.1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	8,526,693,000.00	8,526,693,000.00	-	8,526,693,000.00	100.00	-	-
1.2		Pendapatan Asli Daerah	13,500,000,000.00	1,458,837,972.00	13,164,719,911.20	14,623,557,883.20	108.12	1,049,437,894.28	725,679,501.08
1.3		Dana Perimbangan	193,821,681,300.00	21,226,538,972.00	179,678,066,256.00	200,594,605,228.00	103.25	9,173,731,596.00	2,090,807,668.00
1.4		Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
1.5		Lain - Lain Penerimaan yang Sah	52,392,196,400.00	39,063,667,748.00	8,576,646,543.00	47,640,314,291.00	90.93	1,718,000.00	4,269,862,109.00
1.6		Urusan Kas dan Perhitungan	11,677,044,000.00	13,192,984,742.00	-	13,192,984,742.00	112.91	1,425,940,742.00	-
J U M L A H			279,917,614,700.00	83,378,722,434.00	201,419,432,710.20	284,798,155,144.20	101.74	12,450,827,722.28	7,086,549,278.08

Jayapura, 10 Januari 2014



DAFTAR : TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA
BULAN : DESEMBER 2004

No. Urut	KODE REKENING	U R A I A N	TARGET Rp.	PENERIMAAN BULAN INI	PENERIMAAN S/D BULAN LALU	PENERIMAAN S/D BULAN INI	%	SISA		KETERANGAN
								LEBIH	KURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16,568,000,000	1,452,725,764.51	15,212,203,081.17	16,664,928,845.68	100.59	727,366,713.00	630,437,866.32	96,928,847
I	1 01 05 1 01	PAJAK DAERAH	6,660,000,000	766,516,724.00	6,025,513,091.00	6,792,029,815.00	101.98	169,476,265.00	37,446,450.00	132,029,815
1	1 01 05 1 01 C	Pajak Hotel	1,200,000,000	38,245,283.00	1,168,831,674.30	1,207,076,957.30	100.59	7,076,957.30	-	
2	1 01 05 1 01 02	Pajak Restoran	1,850,000,000	238,349,463.00	1,578,927,705.70	1,917,277,168.70	103.64	67,277,168.70	-	
3	1 01 05 1 01 03	Pajak Hiburan	220,000,000	4,926,250.00	177,627,300.00	182,553,550.00	82.98	-	37,446,450.00	
4	1 01 05 1 01 04	Pajak Reklame	360,000,000	11,346,000.00	432,761,125.00	444,107,125.00	123.36	84,107,125.00	-	
5	1 01 05 1 01 05	Pajak Penerangan Jalan Umum	3,000,000,000	473,000,000.00	2,527,300,475.00	3,000,300,475.00	100.01	300,475.00	-	
6	1 01 05 1 01 06	Pajak Pengambilan & Peng. Bahan Gal. Gol. C	30,000,000	649,728.00	40,064,811.00	40,714,539.00	135.72	10,714,539.00	-	
II	1 01 05 1 02	RETRIBUSI DAERAH	8,658,000,000	570,469,045.00	8,030,997,026.00	8,601,466,071.00	99.35	418,940,648.00	475,474,577.00	(56,533,929)
1	1 01 05 1 02 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	150,000,000	34,329,515.00	145,569,280.00	179,898,795.00	119.93	29,898,795.00	-	
2	1 01 05 1 02 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1,000,000,000	31,626,000.00	976,862,253.00	1,008,488,253.00	100.85	8,488,253.00	-	
3	1 01 05 1 02 03	Ret. Pengg. Biaya Cetak KTP & Akte Catatan Sipil	300,000,000	14,425,000.00	350,427,000.00	344,852,000.00	114.95	14,852,000.00	-	
4	1 01 05 1 02 05	Ret. Pelayanan Pemakaman & Penguburan Masyarakat	12,000,000	1,650,000.00	10,500,000.00	12,150,000.00	101.25	150,000.00	-	
5	1 01 05 1 02 07	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	242,000,000	17,157,000.00	226,993,000.00	244,150,000.00	100.89	2,150,000.00	-	
6	1 01 05 1 02 08	Retribusi Pasar	600,000,000	37,679,500.00	375,680,300.00	413,359,800.00	68.89	-	186,640,200.00	
7	1 01 05 1 02 10	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	4,000,000	1,325,000.00	2,425,000.00	3,750,000.00	93.75	-	250,000.00	
8	1 01 05 1 02 13	Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	15,000,000	-	-	-	-	-	15,000,000.00	
9	1 01 05 1 02 16	Retribusi Terminal	208,000,000	35,047,200.00	180,800,400.00	215,847,600.00	103.77	7,847,600.00	-	
10	1 01 05 1 02 17	Retribusi Tempat Khusus Parkir	750,000,000	27,055,350.00	668,085,800.00	695,141,150.00	92.69	-	54,858,850.00	

1	8	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1 01 05 1 02 19	Retribusi Penyedotan Kakus	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000.00	
12	1 01 05 1 02 20	Retribusi Rumah Potong Hewan	25,000,000	-	-	-	-	-	25,000,000.00	
13	1 01 05 1 02 22	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	10,000,000	2,150,000.00	7,850,000.00	10,000,000.00	100.00	-		
14	1 01 05 1 02 26	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	1,030,000,000	17,354,000.00	1,282,766,500.00	1,300,120,500.00	126.23	270,120,500.00	-	
15	1 01 05 1 02 27	Ret. Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	850,000,000	30,000,000.00	830,000,000.00	860,000,000.00	101.18	10,000,000.00	-	
16	1 01 05 1 02 28	Retribusi Ijin Gangguan	650,000,000	13,602,000.00	665,064,000.00	678,666,000.00	104.41	2,000,000.00	-	
17	1 01 05 1 02 29	Retribusi Ijin Trayek	365,000,000	18,805,000.00	349,350,000.00	368,155,000.00	100.86	3,155,000.00		
18	1 01 05 1 02 30	Retribusi Ijin Usaha Pariwisata	120,000,000	34,850,000.00	85,150,000.00	120,000,000.00	109.00	-	-	
19	1 01 05 1 02 31	Ret. Ijin Praktek Pelayanan Kesehatan & Farmasi	35,000,000	480,000.00	48,132,500.00	48,612,500.00	138.89	13,612,500.00	-	
20	1 01 05 1 02 32	Ret. Tata Cara Pemasukan Minuman Beralkohol	1,760,000,000	175,999,980.00	1,584,000,020.00	1,760,000,000.00	100.00	-	-	
21	1 01 05 1 02 33	Ret. Ijin Usaha Industri & Perdagangan	230,000,000	64,500,000.00	112,500,000.00	177,000,000.00	76.96	-	53,000,000.00	
22	1 01 05 1 02 34	Retribusi Pedagang Kaki Lima	50,000,000	1,185,500.00	39,624,000.00	40,809,500.00	81.62	-	9,190,500.00	
23	1 01 05 1 02 35	Ret. Pem. Produksi Hasil Hutan & Perkebunan	122,000,000	-	95,517,973.00	95,517,973.00	78.29	-	26,482,027.00	
24	1 01 05 1 02 36	Ret. Ijin Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi	25,000,000	9,220,000.00	-	9,220,000.00	36.88	-	15,780,000.00	
25	1 01 05 1 02 37	Ret. Jasa Ketatausahaan	45,000,000	2,028,000.00	13,699,000.00	15,727,000.00	34.95	-	29,273,000.00	
26	1 01 05 1 02 38	Ret. Ijin Usaha Pertambangan Bahan Gal. Gol. C	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000.00	
27	1 01 05 1 02 40	Retribusi Penumpang Kapal Laut	40,000,000	-	-	-	-	-	40,000,000.00	
III	1 01 05 1 03	PENERIMAAN LABA USAHA DAERAH	300,000,000	-	438,949,800.00	438,949,800.00	146.32	138,949,800.00	-	138,949,800
1	1 01 05 1 03 01	Bank Pembangunan Daerah	300,000,000	-	438,949,800.00	438,949,800.00	146.32	138,949,800.00	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV	1 01 05 1 04	PENERIMAAN LAIN - LAIN	950,000,000	115,739,995.51	716,743,165.17	632,483,160.68	87.63	-	117,516,839.32	
1	1 01 05 1 04 02	Jasa Giro	600,000,000	48,247,476.51	507,344,162.14	547,591,638.65	91.27	-	52,408,361.35	
2	1 01 05 1 04 06	Penerimaan Serba - Serbi	350,000,000	75,492,519.00	209,399,001.03	284,891,520.93	81.40	-	65,108,479.07	
V	1 01 01 03 2	DANA PERIMBANGAN	252,374,292,000	242,188,559,148.00	-	242,188,559,148.00	95.96	2,662,340,933	12,848,073,785.00	(10,185,732,852)
	1 01 01 03 2 101	Bagi Hasil Pajak	21,625,500,000	22,183,609,394.00	-	22,183,609,394.00	102.58	2,620,831,394	2,062,722,000.00	109,394
		PBB	7,200,000,000	8,310,889,887.00	-	8,310,889,887.00	115.43	1,110,889,887	-	
		PPh	900,000,000	2,352,941,507.00	-	2,352,941,507.00	261.44	1,452,941,507	-	
		PBB KB	1,600,000,000	1,657,000,000.00	-	1,657,000,000.00	103.56	57,000,000	-	
		PPh	8,425,500,000	8,062,278,000.00	-	8,062,278,000.00	95.69	-	363,222,000.00	
		BBNKB	3,500,000,000	1,800,500,000.00	-	1,800,500,000.00	51.44	-	1,699,500,000.00	
	1 01 01 03 2 101	Bagi Hasil Bukan Pajak	10,148,000,000	904,157,754.00	-	904,157,754.00	8.91	41,509,539	9,285,351,785.00	(9,243,842,246)
		PSDH	1,600,000,000	473,273,215.00	-	473,273,215.00	29.58	-	1,126,726,785.00	
		ROYALTY	2,000,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000,000.00	
		SDA MIGAS	6,100,000,000	-	-	-	-	-	6,100,000,000.00	
		SDA PERIKANAN	330,000,000	371,509,539.00	-	371,509,539.00	112.58	41,509,539	-	
		PAJAK AIR BAWAH TANAH	1,800,000,000	59,375,000.00	-	59,375,000.00	50.32	-	58,625,000.00	
	1 01 01 02 101	Dana Alokasi Umum	170,389,000,000	170,389,000,000.00	-	170,389,000,000.00	100.00	-	-	
	1 01 01 02 101	Dana Alokasi Khusus	6,214,114,000	6,214,114,000.00	-	6,214,114,000.00	100.00	-	-	
	1 01 01 02 101	Dana Perimbangan dari Provinsi	1,500,000,000	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00	(1,500,000,000)
	1 01 01 03 101	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	42,497,678,000	42,497,678,000.00	-	42,497,678,000.00	100.00	-	-	
	1 01 01 03 101	Penerimaan dari Pemerintah: Pusat	9,090,078,000	9,090,078,000.00	-	9,090,078,000.00	100.00	-	-	
	1 01 01 03 101	Dana Otsus Program + Fresh Money	33,407,600,000	33,407,600,000.00	-	33,407,600,000.00	100.00	-	-	

RINCIAN	ANGGARAN Bim. Perubh	ANGGARAN Sdh. Perubh	REALISASI
<u>PENERIMAAN</u>			
Penerimaan Daerah :	62,226,937,550	82,273,963,950	76,632,819,607
1. Sisa Lebih Perhitungan Th. Lalu	442,224,750	1,202,251,150	1,202,251,150
2. Pendapatan Asli Daerah :	2,815,000,000	2,815,000,000	2,511,963,688
- Pajak Daerah	1,190,000,000	1,190,000,000	1,206,965,765
- Retribusi Daerah	1,458,000,000	1,458,000,000	1,154,747,295
- Bagian Laba BUMD	75,000,000	75,000,000	72,318,000
- Penerimaan Dari Dinas - dinas	-	-	-
- Lain - Lain	92,000,000	92,000,000	77,932,628
3. Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak :	7,257,500,000	9,907,500,000	6,539,855,005
- Bagi Hasil Pajak	4,537,500,000	6,637,500,000	3,218,368,144
- Bagi Hasil Bukan Pajak	2,720,000,000	3,270,000,000	3,321,486,861
4. Sumbangan Dan Bantuan :	51,712,212,800	68,349,212,800	65,628,749,764
- Subsidi daerah otonom	25,708,074,800	26,158,074,800	24,075,904,155
- Bantuan	26,004,138,000	42,191,138,000	41,552,845,609
5. Penerimaan Pembangunan :	-	-	-
- Pinjaman Pemda	-	-	-
- Pinjaman BUMD	-	-	750,000,000
<u>PEGELUARAN</u>			
A. Pengeluaran Rutin :	33,570,574,800	36,815,601,200	33,515,492,913
1. Belanja Pegawai	24,999,071,000	25,113,916,000	22,997,765,857
2. Belanja Barang	4,002,691,000	5,298,493,500	4,668,809,405
3. Biaya Pemeliharaan	989,699,000	1,466,038,000	1,043,539,151
4. Belanja Perjalanan Dinas	615,894,000	805,686,500	835,582,300
5. Belanja Lain-lain	1,810,233,000	2,739,239,200	2,581,191,300
6. Angsuran Pinjaman / Hutang	-	-	-
7. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	102,816,000	102,816,000	99,093,000
8. Pensiun / Bantuan	-	-	-
9. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lainnya	662,000,000	783,800,000	783,899,900
10. Pengeluaran Tidak Tersangka	388,170,800	505,612,000	505,612,000
11. Pembagian PAD Pada Kabupaten Dati II Jpr	-	-	-
B. Pembangunan :	28,656,362,750	45,458,362,750	42,789,879,178

Tahun Anggaran 2000

RINCIAN	ANGGARAN Blm. Perubh	ANGGARAN Sdh. Perubh	REALISASI
<u>PENERIMAAN</u>			
Penerimaan Daerah :	61,623,203,500	92,890,692,319	92,429,562,068
1. Sisa Lebih Perhitungan Th. Lalu	0	28,846,789	28,846,789
2. Pendapatan Asli Daerah :	2,651,000,000	2,651,000,000	2,880,718,220
- Pajak Daerah	1,006,000,000	1,006,000,000	1,259,173,421
- Retribusi Daerah	1,540,000,000	1,540,000,000	1,291,442,044
- Bagian Laba BUMD	70,000,000	70,000,000	104,300,000
- Penerimaan Dari Dinas - dinas	-	-	-
- Lain - Lain	35,000,000	35,000,000	225,802,755
3. Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak :	7,604,704,000	8,057,412,030	7,813,165,005
- Bagi Hasil Pajak	3,884,704,000	4,337,412,030	4,058,618,868
- Bagi Hasil Bukan Pajak	3,720,000,000	3,720,000,000	3,754,546,137
4. Sumbangan Dan Bantuan :	51,367,499,500	82,153,433,500	81,706,832,054
- Sumbangan	22,268,108,500	22,268,108,500	21,821,507,074
- Bantuan	29,099,391,000	59,885,325,000	59,885,324,980
5. Penerimaan Pembarugunan :	-	-	-
- Pinjaman Pemda	-	-	-
- Pinjaman BUMD	-	-	-
<u>PEGELUARAN</u>			
A. Pengeluaran Rutin :	31,669,390,953	32,544,377,632	31,529,903,820
1. Belanja Pegawai	22,025,639,000	22,062,039,000	21,548,725,994
2. Belanja Barang	4,237,192,500	4,677,010,945	4,321,892,077
3. Biaya Pemeliharaan	1,186,042,000	1,217,154,225	1,126,769,045
4. Belanja Perjalanan Dinas	496,778,730	496,778,730	485,559,230
5. Belanja Lain-lain	2,209,804,000	2,413,822,250	2,379,741,750
6. Angsuran Pinjaman / Hutang	787,350,000	787,350,000	779,791,674
7. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	192,267,000	192,267,000	192,270,000
8. Pensiun / Bantuan	-	-	-
9. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lainnya	403,000,000	488,000,000	472,050,000
0. Pengeluaran Tidak Tersangka	131,317,723	209,955,482	223,104,050
1. Pembagian PAD Pada Kabupaten Dati II Jpr	0	0	0
. Pembongunan :	30,056,575,277	60,875,874,277	60,499,968,071

Tahun Anggaran 2001

RINCIAN	ANGGARAN Blm. Perubh	ANGGARAN Sdh. Perubh	REALISASI
<u>PENERIMAAN</u>			
Penerimaan Daerah :	123,397,510,000	137,661,494,995	141,444,104,717
1. Sisa Lebih Perhitungan Th. Lalu	0	399,690,177	399,690,177
2. Pendapatan Asli Daerah :	3,360,000,000	4,300,000,000	5,119,620,892
- Pajak Daerah	1,402,500,000	1,812,500,000	2,030,464,429
- Retribusi Daerah	1,822,500,000	2,177,500,000	2,348,927,560
- Bagian Laba BUMD	75,000,000	75,000,000	91,350,000
- Penerimaan Dari Dinas - dinas	0	-	-
- Lain - Lain	60,000,000	235,000,000	648,878,903
3. Bagian Dana Perimbangan :	119,521,248,000	132,255,542,818	134,719,785,748
- Bagi Hasil Pajak	3,925,288,000	7,025,288,000	12,842,162,362
- Bagi Hasil Bukan Pajak	4,930,288,000	11,105,597,068	7,752,965,386
- Dana Alokasi Umum (DAU)	110,665,672,000	114,124,657,750	114,124,658,000
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	0	0	0
- Dana Darurat	0	0	0
4. Sumbangan Dan Bantuan :	0	0	0
- Sumbangan	0	0	0
- Bantuan	0	0	0
5. Penerimaan Pembangunan :	516,262,000	706,262,000	1,205,007,900
- Pinjaman Pemda	500,000,000	500,000,000	506,884,500
- Pinjaman BUMD	0	0	0
* Lain-lain Penerimaan Yong Sah :	16,262,000	206,262,000	698,123,400
<u>PEGELUARAN</u>			
A. Pengeluaran Rutin :	81,500,000,000	92,423,984,995	90,429,927,613
1. Belanja Pegawai	58,761,646,000	61,783,454,000	61,562,486,612
2. Belanja Barang	9,157,997,000	12,305,987,000	11,183,736,461
3. Biaya Pemeliharaan	2,252,226,000	2,965,966,000	2,941,853,270
4. Belanja Perjalanan Dinas	1,222,000,000	1,671,250,000	1,648,895,000
5. Belanja Lain-lain	6,350,326,000	8,442,626,000	8,404,411,550
6. Angsuran Pinjaman / Hutang	546,000,000	546,000,000	526,069,728
7. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	0	0	0
8. Pensiun / Bantuan	439,805,000	439,805,000	439,804,500
9. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lainnya	1,270,000,000	2,295,000,000	1,802,052,500
0. Pengeluaran Tidak Tersangka	1,500,000,000	1,973,896,995	1,920,617,992
1. Pembagian PAD Pada Kabupaten Dati II Jpr	0	0	0
. Pembangunan :	41,897,510,000	45,237,510,000	45,052,844,059

Tahun Anggaran 2002

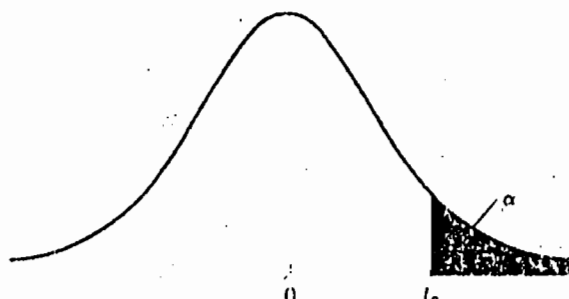
RINCIAN	ANGGARAN Blm. Perubh	ANGGARAN Sdh. Perubh	REALISASI
<u>PENERIMAAN</u>			
Penerimaan Daerah :	0	225,439,473,045	229,067,117,332.
1. Sisa Lebih Perhitungan Th. Lalu	0	5,961,335,045	5,961,335,045
2. Pendapatan Asli Daerah :	0	9,901,535,000	11,181,932,456
- Pajak Daerah		3,240,000,000	3,483,118,965
- Retribusi Daerah		5,729,000,000	6,188,878,357
- Bagian Laba BUMD		100,000,000	268,381,842
- Penerimaan Dari Dinas - dinas		0	-
- Lain - Lain		832,535,000	1,241,553,092
3. Bagian Dana Perimbangan :	0	166,288,118,000	168,635,364,831
- Bagi Hasil Pajak	0	15,457,642,000	17,482,234,815
- Bagi Hasil Bukan Pajak	0	9,550,476,000	9,233,591,016
- Dana Alokasi Umum (DAU)	0	141,280,000,000	141,279,950,000
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	0	0	639,589,000
- Dana Darurat	0	0	0
4. Sumbangan Dan Bantuan :	0	0	0
- Sumbangan	0	0	0
- Bantuan	0	0	0
5. Penerimaan Fembangunan :	0	0	0
- Pinjaman Pemda	0	0	0
- Pinjaman BUMD	0	0	0
Lain-lain Penerimaan Yang Sah :	0	43,288,485,000	43,288,485,000
-Bantuan Pembangunan Propinsi Irian Jaya	0	43,288,485,000	43,288,485,000
<u>PEGELUARAN</u>			
A. Pengeluaran Rutin :	0	134,462,415,045	131,451,928,164
1. Belanjc Pegawai	0	80,099,089,000	77,782,183,729
2. Belanja Barang	0	17,969,558,000	17,535,380,140
3. Biaya Pemeliharaan	0	7,151,858,000	7,054,347,800
4. Belanja Perjalanan Dinas	0	3,687,661,000	3,673,511,000
5. Belanja Lain-lain	0	17,560,594,000	17,519,057,000
6. Usaha - usaha Daerah	0	1,200,000,000	1,200,000,000
7. Bantuan Keuangan	0	500,000,000	500,000,000
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lainnya	0	4,450,000,000	4,343,226,850
Pengeluaran yang Tidak Tersangka	0	1,843,655,045	1,843,621,645
B. Pembangunan :	0	90,977,058,000	89,088,495,823

RINCIAN	ANGGARAN Blm. Perubh	ANGGARAN Sdh. Perubh	REALISASI
<u>PENERIMAAN</u>			
Penerimaan Daerah :	0	268,240,571,400	271,695,170,409
1. Sisa Lebih Perhitungan Th. Lalu	0	8,526,693,000	8,526,693,000
2. Pendapatan Asli Daerah :	0	13,500,000,000	14,623,557,881
- Pajak Daerah		4,883,800,000	5,922,067,802
- Retribusi Daerah		7,086,200,000	7,291,005,723
- Bagian Laba BUMD		200,000,000	341,040,000
- Penerimaan Dari Dinas - dinas		0	-
- Lain - Lain		1,330,000,000	1,069,444,356
3. Bagian Dana Perimbangan :	0	193,821,682,000	200,904,605,237
- Bagi Hasil Pajak	0	21,376,200,000	24,213,749,641
- Bagi Hasil Bukan Pajak	0	6,943,084,000	10,877,255,854
- Dana Alokasi Umum (DAU)	0	160,070,000,000	160,070,000,000
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	0	5,432,398,000	5,743,599,742
- Dana Darurat	0	0	0
4. Sumbangan Dan Bantuan :	0	0	0
- Sumbangan	0	0	0
- Bantuan	0	0	0
5. Penerimaan Pembangunan :	0	0	0
- Pinjaman Pemda	0	0	0
- Pinjaman BUMD	0	0	0
Lain-lain Penerimaan Yang Sah :	0	52,392,196,400	47,640,314,291
- Penerimaan Dari Pemerintah	0	17,040,000,000	12,770,137,891
- Penerimaan Dari Provinsi	0	35,352,196,400	34,870,176,400
<u>PEGELUARAN</u>			
A. Pengeluaran Rutin :	0	189,624,761,700	184,173,315,790
1. Belanja Pegawai	0	104,571,596,500	99,874,040,916
2. Belanja Barang	0	26,709,924,175	26,074,013,919
3. Biaya Pemeliharaan	0	8,965,272,725	8,908,797,855
4. Belanja Perjalanan Dinas	0	4,831,436,000	4,830,004,800
5. Belanja Lain-lain	0	24,973,448,100	24,958,374,100
6. Usaha - usaha Daerah	0	800,000,000	800,000,000
7. Bantuan Keuangan	0	2,725,700,000	2,725,700,000
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lainnya	0	14,188,490,500	14,143,490,500
9. Pengeluaran yang Tidak Tersangka	0	1,858,893,700	1,858,893,700
B. Pembangunan :	0	78,615,809,700	76,557,415,322

RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2004

No	Uraian	Jumlah		No	Uraian	Jumlah	
		Anggaran	Realisasi			Anggaran	Realisasi
1	PENERIMAAN DAERAH	268.942.292.000,00	256.902.169.479,00	2	Belanja	279.632.445.600,00	266.538.475.954,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.568.000.000,00	16.683.186.331	2.1	Belanja aparatur	198.476.821.600,00	187.474.444.145,00
1.1.1.	Pajak Daerah	6.660.000.000,00	6.791.729.338,00		BAU	189.749.187.960,00	178.757.866.405,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	8.658.000.000,00	8.601.466.071,00	2.1.1.	Belanja Pegawai	139.125.744.026,00	128.255.449.093,00
1.1.3.	Penerimaan Laba Usaha Daerah	300.000.000,00	438.949.800,00	2.1.2.	Belanja Barang / Jasa	38.804.178.884,00	38.713.690.262,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	950.000.000,00	851.041.122,00	2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.785.610.000,00	4.785.610.000,00
				2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	7.033.655.050,00	7.003.117.050,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	208.576.614.000,00	199.690.881.148,00		BOP	4.947.826.500,00	4.945.021.100,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak	20.443.500.000,00	22.242.984.394,00	2.1.1.	Belanja Pegawai	1.253.377.000,00	1.253.377.000,00
1.2.1.1	Bagian Daerah dari PBB	7.000.000.000,00	8.310.889.887,00	2.1.2.	Belanja Barang / Jasa	2.484.259.000,00	2.481.462.600,00
1.2.1.2	Bagian Daerah dari BPHTB	900.000.000,00	2.352.941.507,00	2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.023.975.000,00	1.023.975.000,00
1.2.1.3	Bagian Daerah PBB-KB	1.320.000.000,00	1.657.000.000,00	2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	186.215.500,00	186.206.500,00
1.2.1.4	Bagian Daerah PKB-BBNKB	2.680.000.000,00	1.800.500.000,00		Belanja Modal	3.779.807.140,00	3.771.556.640,00
1.2.1.5	Bagian Daerah dari Pajak Air Bawah Tanah	118.000.000,00	59.375.000,00		Belanja Publik	56.940.824.000,00	54.981.231.809,00
1.2.1.6	Bagian Daerah PPh ps 21	8.425.500.000,00	8.062.278.000,00		BAU	5.725.278.400,00	5.725.278.400,00
1.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	188.133.114.000,00	177.447.896.754,00	2.2	Belanja Publik	56.940.824.000,00	54.981.231.809,00
1.2.2.1	Bagian Daerah dari Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.600.000.000,00	473.273.215,00		BAU	5.725.278.400,00	5.725.278.400,00
1.2.2.2	Bagian Daerah dari SDA Migas	6.100.000.000,00	-	2.2.1.	Belanja Pegawai	5.725.278.400,00	5.725.278.400,00
1.2.2.3	Bagian Daerah dari SDA Perikanan	330.000.000,00	371.509.539,00	2.2.2.	Belanja Barang / Jasa	-	-
1.2.2.4	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	1.500.000.000,00	-	2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-
1.2.2.5	Royalti	2.000.000.000,00	-	2.2.4.	Belanja Pemeliharaan	-	-
1.2.2.6	Dana Alokasi Umum (DAU)	170.389.000.000,00	170.389.000.000,00		BOP	17.883.736.400,00	17.524.182.870,00
1.2.2.7	Dana Alokasi Khusus (DAK)	6.214.114.000,00	6.214.114.000,00	2.2.1.	Belanja Pegawai	1.474.210.000,00	1.446.267.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	43.797.678.000,00	42.523.107.000,00	2.2.2.	Belanja Barang / Jasa	9.689.311.050,00	9.371.967.720,00
1.3.1	Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang	9.090.078.000,00	9.090.078.000,00	2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.165.455.000,00	1.160.095.000,00
1.3.2	Dana Otsus	33.407.600.000,00	33.407.600.000,00	2.2.4.	Belanja Pemeliharaan	5.554.760.350,00	5.545.653.150,00
1.3.3	Dana Revisi Belanja Pegawai BKKBN	100.000.000,00	30.424.000,00		Belanja Modal	33.331.809.200	31.731.770.539,00
1.3.4	Insentif PBB tahun 2003	200.000.000	-	2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	23.014.800.000,00	22.882.800.000,00
1.3.5	Insentif Migas tahun 2004	1.000.000.000	-	2.4	Belanja Tidak Tersangka	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
1.4	PEMBIAYAAN		10.964.439.297,00	2.5	PEMBIAYAAN		1.000.000.000,00
1.4.1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu		10.964.439.297,00	2.3.1	Penyertaan Modal Ke Bank Papua		1.000.000.000,00
	Jumlah		269.866.608.776		Jumlah		267.538.475.954,00
					Saldo per 31 Desember 2005		2.328.132.822,00

TABLE F
Student *t* Distribution



The following table provides the values of t_α that correspond to a given upper-tail area α and a specified number of degrees of freedom.

Degrees of Freedom	Upper-Tail Area α									
	0.4	0.25	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
1	0.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	127.32	318.31	636.62
2	.289	.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	14.089	22.327	31.598
3	.277	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453	10.214	12.924
4	.271	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	0.267	0.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	.265	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	.263	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	.262	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	.261	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	0.260	0.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	.260	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	.259	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	.259	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	.258	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	0.258	0.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	.258	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	.257	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	.257	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922
19	.257	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	0.257	0.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	.257	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	.256	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	.256	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.104	3.485	3.767
24	.256	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25	0.256	0.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26	.256	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27	.256	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690
28	.256	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29	.256	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659
30	0.256	0.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646
40	.255	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551
60	.254	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460
120	.254	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	2.860	3.160	3.373
∞	.253	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	2.807	3.090	3.291

Source: E. S. Pearson and H. O. Hartley, *Biometrika Tables for Statisticians*, Vol. I, London: Cambridge University Press, 1966. Partly derived from Table III of Fisher and Yates, *Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research*, published by Longman Group Ltd., London (previously published by Oliver & Boyd, Edinburgh, 1963). Reproduced with permission of the authors and publishers.



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kabupaten III No. 2 Telp. (0967) 535749, 537380 Fax (0967) 523879 Jayapura Papua

Jayapura, 03 Agustus 2005

Nomor : 423.6/377
Lampiran : -
Perihal : Keterangan melaksanakan Penelitian.

Kepada
Yth. Rektor Universitas Sanata
Dharma Fakultas Ekonomi
di -

YOGYAKARTA

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor : 31/Kaprodi Akt/283/V/2005
perihal Surat Ijin Penelitian, dalam rangka persiapan Penyusunan Skripsi atas :

Nama Mahasiswa : **DYAH HAYU S. DEWI**
N I M : 00 2114 168
Program Studi : Akuntansi
Jurusan : Akuntansi
Semester : X

Benar - benar telah melakukan Penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah
Kota Jayapura dari tanggal 27 Juni s/d 03 Agustus 2005.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul
" **ANALISIS KONTRIBUSI DAN PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK
DAERAH SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI KHUSUS** ".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

**An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA JAYAPURA**

**KASUBDIT PENDAFTARAN, PENDATAAN
DAN DOKUMENTASI**



**TOMAR HUTAPEA, SH
NIP. 640 021 877**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dyah Hayu Susetya Dewi
Tempat Tanggal Lahir : Jayapura, 8 Oktober 1982
Agama : Katholik
Alamat : Perum. Janti Buana Asri RT 15A No. B-15
Yogyakarta, 55198

Nama Orang Tua
Ayah : Ignatius Agung Bratanto
Ibu : Margareth Agusta Roeroe
Alamat Orang Tua : Jln. Garuda 1 No.1 Dok V Bawah, Jayapura
Papua, 99115. Telp. (0967) 533078

Pendidikan : TK Kristus Raja Dok V Jayapura
SD Kristus Raja Dok V Jayapura
SMP Negeri 1 Jayapura
SMU Negeri 2 Jayapura
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

